

**MODEL PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
HIDUP PABRIK KULIT PT. USAHA LOKA
(Studi di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Malang)**

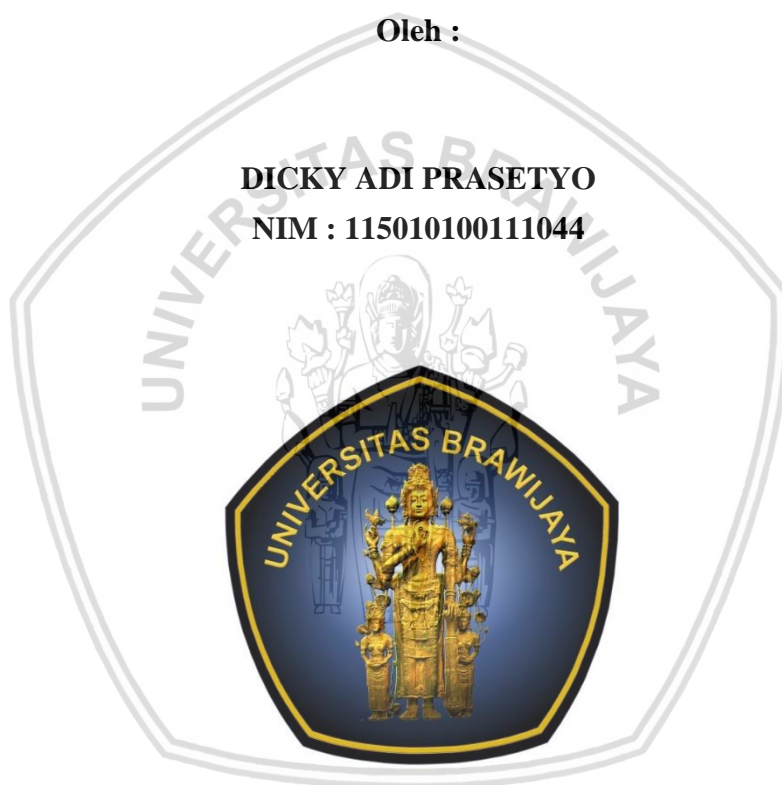
SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DICKY ADI PRASETYO

NIM : 115010100111044



KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**MODEL PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PABRIK
KULIT PT. USAHA LOKA**

(Studi di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Malang)

OLEH :

DICKY ADI PRASETYO

115010100111044

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Istislam, S.H., M.Hum.
NIP. 196208231986011002

Lutfi Efendi, S.H., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Efendi, S.H., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 1962080519288021001



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 458/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : DICKY ADI PRASETYO
NIM : 115010100111044
Judul : MODEL PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PABRIK
KULIT PT. USAHA LOKA
(Studi di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Malang)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Mei 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB



**MODEL PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PABRIK KULIT
PT. USAHA LOKA**

(Studi di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Malang)

Dicky Adi Prasetya, Dr. Istislam, S.H., M.Hum, Lutfi Efendi,
S.H, M.Hum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Dickyadiprasetyo1992@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dititikberatkan pada permasalahan yang dilatarbelakangi oleh pencemaran sungai Badek di kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang oleh pabrik kulit PT. USAHA LOKA. Oleh karenanya penulis merumuskan model penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara pabrik kulit PT. USAHA LOKA dengan masyarakat Ciptomulyo selama ini telah dilakukan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara pabrik kulit PT. USAHA LOKA dengan masyarakat Ciptomulyo. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Lokasi penelitian yakni di Kelurahan Ciptomulyo.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Lingkungan Hidup.



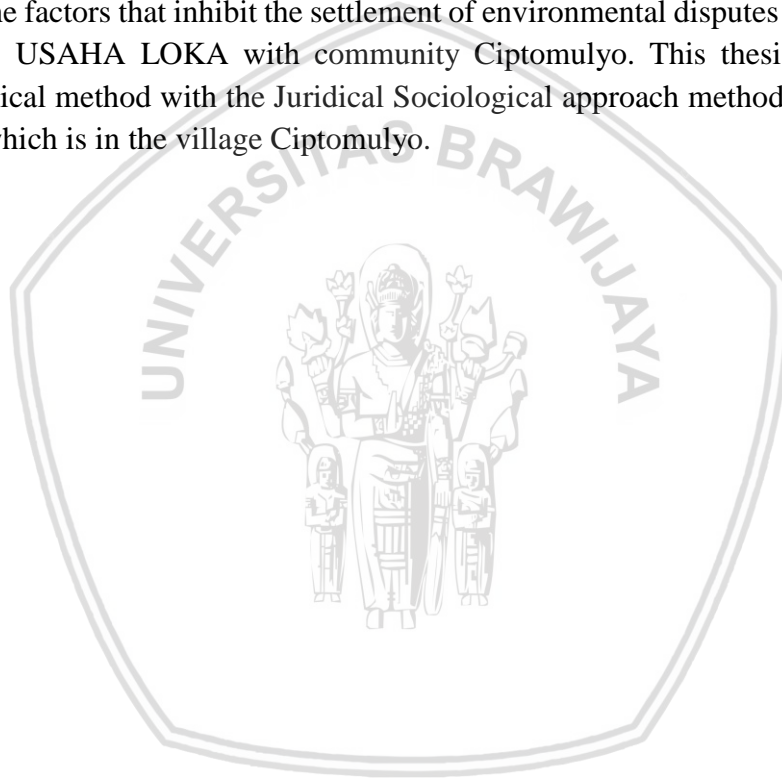
**MODEL PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PABRIK KULIT
PT. USAHA LOKA**

(Studi di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Malang)

Dicky Adi Prasetya, Dr. Istislam, S.H., M.Hum, Lutfi Efendi,
S.H, M.Hum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Dickyadiprasetyo1992@gmail.com

Abstract

The research placed on problems that effected by the pollution of the river Badek Ciptomulyo Sub-district in kelurahan Breadfruit Malang by skin factory of PT. USAHA LOKA. Therefore the author to formulate a model of the environmental dispute resolution between the skin factory of PT. USAHA LOKA with the community Ciptomulyo as long as this has been done and what are the factors that inhibit the settlement of environmental disputes between the skin factory of PT. USAHA LOKA with community Ciptomulyo. This thesis research using empirical juridical method with the Juridical Sociological approach method. The location of the research, which is in the village Ciptomulyo.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karunia yang tiada henti sehingga karya tulis berupa skripsi yang berjudul “MODEL PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PABRIK KULIT PT. USAHA LOKA (Studi di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Malang)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, karena itu penulis sampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Efendi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan ide, masukan dan kritik yang disampaikan.
3. Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama atas bimbingan, bantuan, dan kesabarannya.
4. Seluruh staf dan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan tambahan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
5. Kedua orang tua, Slamet Hariyono, Ibunda tercinta (Almh.) Ermina Yuliasuti, dan Kakak tercinta atas dukungan dan doanya dalam pembuatan skripsi ini.
6. Istri Tercinta Alifa ChiQuitita Hadiana, S.Pd., atas kesabaran dan dukungannya.

Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, demi penyempurnaan skripsi ini segala usul, saran, kritikan yang bersifat konstruktif, penulis terima dengan tangan terbuka disertai ucapan terimakasih.

Malang, 21 Mei 2018

Dicky Adi Prasetyo

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Lembar Pengesahan | ii |
| Pernyataan Keaslian Skripsi | iii |
| Kata Pengantar | iv |
| Ringkasan..... | v |
| Summary | vi |
| Daftar Isi | vii |
| Daftar Tabel | ix |
| Daftar Gambar | x |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 01 |
| B. Rumusan Masalah | 08 |
| C. Tujuan Penelitian | 08 |
| D. Manfaat Penelitian | 09 |
| E. Sistematika Penulisan | 09 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan | 11 |
| B. Tinjauan Umum Pembangunan Dengan Pencemaran Lingkungan..... | 20 |
| C. Tinjauan Umum Model Penyelsaian Sengketa Lingkungan..... | 23 |
| D. Tinjauan Umum Hak Dan Kewajiban Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Lingkungan | 30 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian | 33 |
| B. Pendekatan Penelitian | 33 |
| C. Lokasi Penelitian | 34 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 34 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| F. Populasi dan Sampel | 37 |
| G. Teknik Analisis Data | 38 |
| H. Definisi Operasional..... | 39 |

**BAB IV MODEL PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
PABRIK KULIT PT. USAHA LOKA (Studi di Kelurahan Ciptomulyo
Kecamatan Sukun Malang)**

| | |
|--|----|
| 1. Gambaran Umum Kelurahan Ciptomulyo Malang..... | 40 |
| 2. Gambaran Umum PT Usaha Loka Malang | 49 |
| A. Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Antara Pabrik Kulit PT Usaha Loka Dengan Masyarakat Ciptomulyo Selama Ini telah Dilakukan..... | 56 |
| 1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan..... | 64 |
| 2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan..... | 65 |
| B. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Antara Pabrik Kulit PT. Usaha Loka Dengan Masyarakat | 71 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran | 78 |

| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 79 |
| LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Orisinalitas Penelitian | 05 |
| Tabel 2. Perhitungan Kebutuhan Air Kecamatan Sukun | 42 |
| Tabel 3. Kriteria Indeks Pencemaran (Pij)..... | 54 |
| Tabel 4. Karakteristik limbah cair penyamakan kulit (T0)..... | 55 |
| Tabel 5. Kualitas Air Sungai Badek | 55 |
| Tabel 6. Status Mutu Air Sungai Badek | 56 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Kerangka penegakan Hukum Lingkungan | 26 |
| Gambar 2. Usaha Konveksi Kelurahan Ciptomulyo..... | 44 |
| Gambar 3. Usaha kue semprit & Bumbu Pecel | 45 |
| Gambar 4. Kondisi Sungai Badek Kelurahan Ciptomulyo..... | 49 |
| Gambar 5. Kondisi Barang-Barang Yang Terkena Efek Limbah Kelurahan Ciptomulyo | 50 |
| Gambar 6. Sistem Pengolahan Limbah Cair PT Usaha Loka..... | 51 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditinjau dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan UUPH pada hakikatnya mengatur adanya pengintegrasian prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan ke dalam legislasi nasional. Peranan UUPH diharapkan dapat membentuk perilaku bernegara antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga kondisi demikian berimplikasi terhadap pelaku usaha dan pengambil keputusan (penyelenggara Negara) agar dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai pembangunan berwawasan lingkungan. Prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang terintegrasi di dalam UUPH juga memudahkan serta memberi panduan bagi pengambil keputusan administratif serta pengadilan dalam mengambil keputusan.

Namun dalam penerapannya terdapat kendala teknis pada aturan UUPH dalam bidang pengelolaan pengaduan masyarakat, yang sering terjadi ¹ yaitu pengaduan masyarakat pada saat terjadi kerusakan lingkungan kedalam perangkat penengak hukum lingkungan administrasi yang terdiri dari: alat pertama yaitu izin lingkungan; kedua, kebadan pejabat pengawas; ketiga, persyaratan izin lingkungan; keempat, mekanisme pengawasan dan yang terakhir adalah sanksi

¹ Eggi Sudjana, Riyanto. 1999. **Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia**. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm 247-248.

administrasi.² Namun, kondisi dilapangan dalam pengaturan UUPLH begitu diterapkan di lapangan tidak jalan atau berjalan sebagian. Karena dalam UUPLH mengatur bahwa Lingkungan hidup yang tidak seimbang harus dikembalikan lagi fungsinya dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antara generasi melalui peningkatan penegakan hukum.³

Contoh demikian dapat dilihat dari Pemerintah Kota Malang yang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Malang dan telah diubah melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Pencemaran Air. Perda Kota Malang No.16 Tahun 2001 merupakan peraturan yang lahir dari UUPLH. Peraturan tersebut merupakan seperangkat hukum yang dijadikan pedoman dalam mengatasi perdebatan antara pihak Pabrik Kulit PT USAHA LOKA dengan masyarakat warga kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yaitu atas kondisi sumur dan sungai di sekitar permukiman yang tercemar limbah pabrik penyamakan sejak tahun 1980. Kondisi pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah pabrik menyebabkan sumber air (sumur dan sungai) menjadi tidak layak konsumsi, dan lebih jauh kondisi pencemaran

² Majalah Bulanan Lingkungan Hidup OZON, Volume 02, Nomor 7, April 2001, Yayasan Cahaya Reformasi Semesta, Hlm 13.

³ Siri Sundari Rangkuti. 1996. **Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional**. Surabaya. Airlangga University Press. hlm 190. Menyatakan bahwa Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepathan warga masyarakat terhadap peraturan ang berlaku, yang meliputi tida bidang hukum, yaitu administrative, pidana, dan perdata. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau acarman) sarana administrative , kepidanaan, ,dan keperdataan.

udara karena bau dari limbah yang masuk menyebabkan beberapa warga kelurahan Ciptomulyo mengalami masalah pernafasan akut.⁴

Jika dilihat dalam kasus diatas, penyelesaiannya kasus tersebut dalam UUPLH bisa lewat di luar pengadilan (musyawarah) atau lewat jalur pengadilan dan ditinjau dari bentuk perkaranya, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan acara perdata, acara pidana atau acara administrasi.⁵ Penyelesaian atau proses penegakan hukum ini merupakan salah satu alternatif yang diberikan Negara terhadap masyarakat untuk memenuhi hak –hak subjektif (*Subjective Rights*).⁶ Hak tersebut berupa dapat mengajukan tuntutan terkait kepentingan terhadap lingkungan hidup agar menjadi baik dan sehat lewat prosedur hukum dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.⁷ Lebih jauh tuntutan dengan pola ini memiliki dua fungsi yang berbeda. *Pertama*, berkaitan pada hak membela diri dari gangguan dari luar yang menyebabkan kerusakan pada lingkungannya, hal ini diatur dalam pasal 91 UUPLH, sedangkan Fungsi *Kedua* dikaitkan kepada hak menuntut dalam menindaklanjuti lingkungan agar dapat dilestarikan, dipulihkan, atau diperbaiki.⁸

⁴ Tempo.co, Air Sumur Warga Malang Tercemar Limbah, Jumat, 24 Januari 2014 14:32 WIB, online, dapat diakses di <https://nasional.tempo.co/read/548031/air-sumur-warga-malang-tercemar-limbah>, diakses pada tanggal 09 Januari 2018.

⁵ Dalam Pasal 84 ayat (1) UUPLH.

⁶ adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang.

⁷ Heinhard Steiger, et al. 1980. **The Fundamental Right To a Decent Environment**, dalam **Trends In Environmental Policy On Law**, IUCN, Gland, Swizerland, hlm 3, Dalam Koesnadi Hardjasoemantri. 1993. **Hukum Tata Lingkungan**. Edisi Ke 5. Gadjah Mada University Press. hlm 128.

⁸ Dalam teks asli tulisan ini berbunyi (1) *the function of defense (abwehrfunktion) the right of the individual to defend himself against an interference with his environment which is to his disadvantage*; (2) *the function of performance (leistungsfunktion), the right of the individual to demand the performance of an act in order to preserve, to restore, or to improve his environment*.

Namun, model penyelesaian sengketa antara Pabrik Kulit PT. USAHA LOKA dengan masyarakat Kelurahan Ciptomulyo sejak tahun 1980 hanya ditempuh dengan jalur mediasi dan difasilitasi oleh pihak ketiga. Putusan hasil penampungan keluhan masyarakat direspon baik oleh pemerintah maupun perusahaan dengan memperbaiki alat pengelolaan air limbah dan/atau alat penampungan limbah dan/atau selang penyalur air limbah dalam sungai masyarakat yang hanya bertahan hitungan tahun sebelum terjadi pencemaran kembali dengan ketentuan bahwa PT. USAHA LOKA telah memenuhi kewajibannya melakukan penanganan dan pemulihan lingkungan yang diakibatkan dari limbah perusahaan tersebut.

Ketidaksanggupan masyarakat untuk membawa perkara tersebut kedalam jalur pengadilan karena tekanan moral serta empati yang diberikan perusahaan terhadap masyarakat dengan ancaman ekonomi warga Kelurahan Ciptomulyo yang berkerja di PT.USAHA LOKA. Pada tahun 2014, pasca dilakukannya uji kualitas air di beberapa titik sumur dan sungai (kali badek) warga oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Malang, Jawa Timur, mengeluarkan surat teguran terhadap dua pabrik kulit yang diduga mencemari lingkungan PT. USAHA LOKA terbukti mencemari Kali Badek yang terletak di Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Namun Badan Lingkungan Hidup tidak menindak tegas pabrik pengolah kulit tersebut, misalkan menghentikan izin operasional ataupun menutup pabrik. Alasannya karena perusahaan akan dibina⁹

⁹Tempo.co Dua Pabrik Kulit di Malang Mencemari Lingkungan, Senin, 24 Februari 2014 17:47 WIB, online, dapat diakses di <https://nasional.tempo.co/read/557131/dua-pabrik-kul-it-di-malang-men-cemari-lingkungan>, diakses pada 9 Januari 2018

dan kondisi air sungai maupun sumur yang dilaporkan masih memenuhi ketentuan dalam AMDAL.¹⁰

Cara penyelesaian sengketa lingkungan tersebut merupakan bentuk dari penerapan penegakan Hukum melalui UUPH yang diperankan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Opsi-opsi yang diberikan oleh UU merupakan bentuk keyakinan antara para pihak dalam mempertahankan hak mereka, sehingga nilai keefektifan masing-masing model penyelesaian yang dipilih oleh para pihak menjadi objek kajian yang penulis pilih untuk dikaji dalam skripsi yang berjudul **“MODEL PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PABRIK KULIT PT. USAHA LOKA (Studi di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Malang)”**. Adapaun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan perbandingan dan pembeda dari penelitian skripsi yang peneliti tulis akan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

| No. | Tahun Penelitian | Nama Peneliti dan Asal Instansi | Judul Penelitian | Rumusan Masalah | Keterangan |
|-----|------------------|--|--|---|---|
| 1. | 2015 | Bayu Pradana, Fakultas Hukum Universitas | Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Pemerintah | 1. Apa bentuk sanksi yang diberikan Pemerintah Kota Malang dalam kasus tercemarnya lingkungan | Terdapat perbedaan lingkup kajian penelitian, |

¹⁰ Hasil wawancara pada Bulan Januari, 2018, di Kelurahan Ciptomulyo.

| | | | | | |
|----|------|--|--|---|---|
| | | Muhammadiyah Malang | Daerah Kota Malang Terkait Kasus Tercemarnya Lingkungan Akibat Kegiatan Pabrik Penyamakan Kulit (Studi Kasus Tercemarnya Lingkungan Di Kelurahan Ciptomulyo Akibat Kegiatan Pabrik Penyamakan Kulit), | akibat kegiatan pabrik penyamakan kulit? 2. Bagaimana mekanisme pemberian sanksi yang diberikan Pemerintah Kota Malang dalam kasus tercemarnya lingkungan akibat kegiatan pabrik penyamakan kulit? 3. Bagaimana efektivitas dari sanksi yang diberikan Pemerintah Kota Malang dalam kasus tercemarnya lingkungan akibat kegiatan pabrik penyamakan kulit? | yakni peneliti berfokus pada proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang bersangkutan |
| 2. | 2014 | Faizal Nur Bachtiar, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup | 1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten | Terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu bahwa selain |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | <p>Terhadap Pabrik Yang Mencemari Air Sungai Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar No. 46 Tahun 2011</p> | <p>Blitar terkait pencemaran air sungai di Desa Jatilengger berdasarkan Peraturan Bupati Blitar No. 46 Tahun 2011 Tentang Penjabaran</p> <p>2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup di dalam melakukan penegakkan hukum lingkungan terhadap pencemaran air di Desa Jatilengger?</p> <p>3. Apa upaya yang seharusnya dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pencemaran air sungai Di Desa Jatilengger?</p> | <p>lokasi penelitian yang berbeda, peneliti lebih fokus dalam proses-proses dan upaya dari masyarakat melalui kelurahan Ciptomulyo dalam menangani kasus pencemaran limbah ke sungai.</p> |
|--|--|--|--|--|---|

Sumber: Diolah dari data sekunder, 2018

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Model penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara pabrik kulit PT. USAHA LOKA dengan masyarakat Ciptomulyo selama ini telah dilakukan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara pabrik kulit PT. USAHA LOKA dengan masyarakat Ciptomulyo?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis Model penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara pabrik kulit PT. USAHA LOKA dengan masyarakat Ciptomulyo selama ini telah dilakukan.
2. Mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa saja yang menghambat penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara pabrik kulit PT. USAHA LOKA dengan masyarakat Ciptomulyo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bagi hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Masyarakat pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak civitas akademika sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut tentang penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bisa dijadikan untuk bahan pertimbangan maupun masukan dalam penyempurnaan pemilihan model penyelesaian sengketa lingkungan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan kepada masyarakat untuk semakin memahami konsep Hukum Lingkungan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dalam bab-bab yang menguraikan permasalahan secara tersendiri. Peneliti membuat sistematika dengan membagi pembahasan ke dalam 5 (lima) bab terperinci. Adapun bagian-bagiannya adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai uraian beberapa topik secara luas yang berkaitan dengan judul yang akan digunakan dalam pembahasan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian atau pedoman yang digunakan peneliti untuk menganalisis data dan mengolah data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dengan berpedoman pada metode penelitian yang digunakan sehingga dapat terjawab permasalahan-permasalahan dibahas dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari pembahasan dan berisi saran dan kritik terhadap permasalahan yang diangkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan

Adanya intergrasi prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan ke dalam legislasi nasional. Peranan dari UUPH diharapkan dapat membentuk perilaku masyarakat, terutama pengambil keputusan dan pelenggara Negara agar dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai pembangunan berwawasan lingkungan, integrasi prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan ke dalam UUPH juga memudahkan serta memberi panduan bagi pengambil keputusan administratif serta pengadilan dalam mengambil keputusan.

UUPH sebenarnya sudah dipandang cukup ideal, namun sayangnya Undang-Undang ini mengalami ketumpulan dalam pelaksanaannya dan masih banyak rumusan dalam pasal-pasal UUPH yang masih tumpang tindih dengan kepentingan sektoral ketika diimplementasikan. Tidak heran bila terdapat *Legal Gap* atau celah dalam UU ini yang dimanfaatkan dengan baik oleh pelaksana kegiatan atau usaha untuk mencari titik temu dimana pengaturan dalam UU tidak bisa diterapkan. Sehingga aparat penegak hukum yang notabene kurang memahami hukum dapat dikatakan salah tingkah sementara korban pencemaran gigit jari menelan kepahitan ketika pelaku kejahatan lingkungan lenggang kangkung. Oleh karena itu, membicarakan permasalahan dari UU No.23 Tahun 1997 sama halnya dengan membicarakan permasalahannya dalam upaya penegakan hukum. Permasalahan-permasalahannya dapat dibedakan atas dua (2)

bentuk, yang pertama dalam bentuk permasalahan yang sifatnya struktural dan yang kedua dalam bentuk permasalahan yang sifatnya teknis. Dalam permasalahan struktural, ada dua faktor yang mengganggu dalam penegakan hukum, yaitu:¹¹

- a. Masih terdapat pemikiran yang terlalu dominan di kalangan penentu kebijakan yang mempertentangkan pembangunan dengan lingkungan;
- b. Belum sepenuhnya tercipta *Clean and Good Government*, yang menyulitkan pada penegakan hukum lingkungan terhadap pandangan pembangunan berkelanjutan yang tercermin dalam dokumen-dokumen kenegaraan, pemerintah kita seperti GBHN, dan internasional. Pada agenda internasional diantaranya Deklarasi Rio dan Agenda 21 Global, belum dilaksanakan pada pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pemikiran yang bertentangan dengan pembangunan dan lingkungan berpengaruh terhadap tindakan yang diambil oleh pemerintah yang seharusnya berfungsi mengatur serta mengawasi semua kegiatan pembangunan yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Banyak contoh yang dapat dikemukakan bahwa tidak terciptanya pengawasan yang baik dan konsisten dikarenakan “kedekatan” antara yang mengawasi (*regulator*) dan yang diawasi (*regulated*) yang melahirkan sikap membiarkan pelanggaran.

¹¹ Eggi Sudjana, Riyanto. 1999. **Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia**. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm 247-248.

Sedangkan permasalahan yang bersifat teknis antara lain:

- a. Manajemen pengaduan oleh masyarakat pada bidang lingkungan

Dalam bab II mengenai hak, kewajiban, dan peran masyarakat, khususnya pasal 6 ayat (2) menyatakan “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup”.¹²

Menurut Eggi Sudjana dan Riyanto, kendala yang dihadapi yaitu bagaimana pengaduan dari masyarakat dalam mauatan informasi ketika terjadi pencemaran lingkungan? Dalam kenyataan justru seorang pelapor/pembawa informasi tersebut yang menjadi korban. Sebagai contoh korban pencemaran lingkungan yang dialami seorang warga tenggumung, Kota Surabaya, beliau membayar hukuman denda sebesar Rp. 40.000.000,- dikaerakanakan akibat laporan terkait sumur dirumah beliau telah tercemar minyak yang berasal dari pabrik sebelah rumahnya.¹³

Dalam kasus itu “warga korban” berubah menjadi “korban hukum” setelah pengadilan Surabaya mengabulkan gugatan perdata Perusahaan Pencemar, karena menganggap tergugat telah membuat laporan palsu sehingga mengakibatkan

¹² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹³ *Ibid*, hllm 248-249.

terceemarnya nama baik perusahaan tersebut. Sebagaimana diketahui, korban oleh pihak kepolisian dianggap telah membuat laporan palsu, karena berdasarkan pengecekan di lapangan, pihak kepilisian tidak melihat bahwa sumur korban tercemari minyak.

Kenyataan dilapangan bahwa sumur berubah jadi bersih “ketika polisi datang,” karena korban telah mendapatkan dan melakukan saran dari tim teknis KPPLH untuk terus mengebor sumurnya selama 1 minggu. Hingga kemudian sumur tersebut menjadi bersih dan pada saat itulah baru pihak kepolisian datang meninjau lokasi. Realitas ini memberikan sekali lagi bukti kepada kita bahwa korban tidak berdaya pada kontrol dalam prosedur pelaporan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan dirinya sendiri menjadi korban mekanisme penegakan hukum lingkungan itu sendiri.

- b. perizinan lingkungan yang tumpang tindih dikarenakan proesedur yang banyak sekali dan padat.

Beraneka macam izin menunjukkan kondisi bagaimana rusaknya pengendalian pencemaran lingkungan. Khususnya berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan admininstrasi. Sebetulnya, perangkat peengakan hukum lingkungan admininstrasi yang utama menurut siti sundari rangkuti adalah, instrumen dalam pencegahan pencemaran yang pertama yaitu izin lingkungan; kedua, kebadaan pejabat pengawas; ketiga,

persyaratan izin lingkungan; keempat, mekanisme pengawasan dan yang terakhir adalah sanksi administrasi.¹⁴ Namun, dalam praktiknya pengaturan dalam UUPH begitu diterapkan di lapangan praktis tidak jalan. Hal demikian disebabkan oleh banyaknya izin lingkungan yang berdiri sendiri dan sifatnya sektoral.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri bahwa “usaha atau ikhtiar oleh semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban yang kolektif kepada semua komponen bangsa, dan yaitu revisi bahwa hukum hanya ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu”, antara lain:¹⁵

- a. Aparatur negara yang bertugas antara lain polisi, hakim dan jaksa, dalam dunia hukum disebut sebagai *the three musketers* atau disebut juga tiga (3) pendekar hukum memiliki fungsi penegakan yang memiliki sifat berbeda-beda, tetapi tertuju pada terciptanya hukum yang adil dan bermanfaat bagi semua manusia.
- b. Pengacara memiliki fungsi sebagai advokasi dan mediasi kepada masyarakat baik bekerja secara individu maupun yang bergabung secara kelompok pada lembaga-lembaga bantuan hukum, menjadi tuntunan masyarakat yang belum mengerti atau belum tahu tentang hukum, sehingga dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Sehingga putusan hakim mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;

¹⁴ Majalah Bulanan Lingkungan Hidup OZON, Volume 02, Nomor 07, April 2001, Yayasan Cahaya Reformasi Semesta, Hlm 13.

¹⁵ Ilhami Bisri. 2012. **Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia**. Jakarta. Rajawali Pers. hlm. 128.

- c. Para eksekutif yang berada di berbagai tempat pengabdian mulai dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban hingga para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif); dan
- d. Masyarakat yang menggunakan jasa hukum, kadang-kadang secara kondisi menyedihkan menjadi masyarakat pencari keadilan.¹⁶

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief juga menjelaskan bahwa “Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo, bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum yaitu “suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturanperaturan hukum) menjadi kenyataan. Secara konsep, inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak

¹⁶ *Ibid*, hlm. 128.

¹⁷ Barda Nawawi Arief. 2002. **Kebijakan Hukum Pidana**. Bandung . Citra Aditya Bakti. hlm. 109.

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”¹⁸

Ada beberapa faktor yang berkaitan dalam penentuan proses penegakan hukum sebagaimana dijelaskan Lawrence M Friedman dikutip Esmi Warassih Puji Rahayu yaitu: Komponen Struktur, Substansi, kultur. Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapat perhatian yang seksama. Bagian-bagian tersebut tercakup pada ruang lingkup kinerja hukum sebagai suatu sistem. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum.¹⁹ Bagaimana penegakan hukum paling tidak pada pengertian penegakan hukum dalam arti luas yaitu meliputi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukm, serta dalam arti yang sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.²⁰

Uraian di atas memberikan pengertian penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan dalam arti formil maupun dalam arti materil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, mulai para subjek hukum yang bersangkutan hingga dilakukan oleh aparat penegak hukum

¹⁸ Satjipto Raharjo. 2009. **Penegakan Hukum**. Yogyakarta . Genta Publishing. hlm. 24.

¹⁹ Esmi Warrasih Puji Rahayu. 2005. **Pranta Hukum Sebuah Telaah Sosiologis**. Semarang . Suryandaru Utama. hlm. 29.

²⁰ Sabian Utsman, 2008, **Menuju Penegakan Hukum Rseponsif**, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 30.

yang memiliki tugas dan kewenangan oleh UU agar berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹

Dari penjabaran teori-teori diatas dapat menjelaskan bahwa penegakan hukum sangat penting agar hukum dapat berjalan dengan baik sehingga terciptanya masyarakat yang adil, aman dan sejahtera. Dengan sungai yang tercemar oleh limbah, seharusnya para pihak segera bersinergi dan merancang penanganan secara bersama sehingga menjadikan solusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Dan jika salah satu pihak kurang bisa menjalankan hak dan kewajibannya, sudah menjadi kewajiban untuk pihak lain yang terkait saling mengingatkan dengan cara yang baik.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penegakan hukum yaitu “ kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan meneghewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”²² Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

1. Faktor Hukum

Praktik pelaksanaan hukum di lapangan kadang-kadang terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum karena konsep keadilan yaitu rumusan yang berbentuk abstrak, sedangkan kepastian hukum yaitu prosedur yang ditentukan secara normatif. Sehingga tidak bertentangan dengan hukum.

²¹ Hans Kelsen. 2011. **Teori Umum Tentang Hukum dan Negara**. terj. Muttaqien, Raisul. Bandung . Nusa Media. hlm. 89.

²² Dellyana, Shant. 1988. **Konsep Penegakan Hukum**. Yogyakarta. Liberty. hlm. 32.

2. Faktor Penegakan Hukum

Mental atau kepribadian petugas penegak hukum memiliki peran yang sangat penting, karena jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas dari para petugas kurang baik bisa menyebabkan masalah.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor ini melingkupi perangkat lunak dan perangkat keras. contoh sarana perangkat lunak yaitu pendidikan. Pendidikan yang diajarkan kepada Polisi pada zaman sekarang lebih mengarah kepada pada hal-hal yang praktis zaman dahulu (kuno), sehingga polisi mengalami hambatan- hambatan pada tujuannya, sebagai contoh kasus yaitu pengetahuan mencakup kejahatan komputer atau *cyber crime*, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa.

4. Faktor Masyarakat

Dalam melaksanakan penegak hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Setiap masyarakat atau kelompok mempunyai kesadaran hukum. Permasalahan yang muncul yaitu taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau rendah atau kurang.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar untuk masyarakat, yaitu mengatur terkait bagaimana seharusnya berbuat , bertindak, dan menentukan sikap dan peraturan terkait apa yang harus dilakukan, serta apa yang dilarang dalam berhubungan dengan orang lain.²³

B. Tinjauan Umum Pembangunan Dengan Pencemaran Lingkungan

Dasar hukum pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam di Negara kita ini dimuat pada rumusan yang menegaskan bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”²⁴ Hak Negara dalam mengatur dan menguasai kekayaan Negara yang terkandung di bumi

²³ Soerjono Soekanto. 2004. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum** Cetakan Kelima. Jakarta. Raja Grafindo Persada. hlm 42.

²⁴ pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dijabarkan dalam UU 4/1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) menetapkan bahwa pemerintah:

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
- c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum dalam bentuk lainnya serta perbuatan hukum terhadap SDA, dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika;
- d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial; dan
- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perUUan yang berlaku.²⁵

Kewenangan untuk mengelola kekayaan Negara terhadap SDA dan sumber daya buatan ini bertujuan antara lain:

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;
- b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai Pembina lingkungan hidup;
- d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang; dan
- e. Terlindungnya Negara terhadap dampak kegiatan yang berasal dari luar wilayah Negara yang menimbulkan pencemaran lingkungan.²⁶

²⁵ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁶ pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”²⁷

Betapa luasnya dimensi pengelolaan lingkungan hidup ini sehingga pendekatannya harus dilakukan secara multi dan interdisipliner, serta lintas sektoral. Aspek hukum yang dikemukakan pada kesempatan ini adalah salah satu sarana penunjang untuk menyukkseskan pembangunan tersebut di samping sarana penunjang lainnya misalnya aspek pendanaan dan aspek kelembagaan.

Pada saat melakukan pembangunan harus mengutamakan pelestarian lingkungan. Media masa sering memberitakan berbagai contoh kerusakan lingkungan yang terjadi tersebar di berbagai daerah. Bahkan banyak kasus lainnya yang belum atau tidak sempat diberitakan. Sedangkan kasus dalam penegakan Hukum lingkungan pada saat ini meliputi:

1. Masalah pencemaran oleh pihak industri;
2. Masalah pencemaran sungai; dan
3. Masalah perusakan hutan

Sehingga saat ini sangat penting karena jumlah kasus pencemaran lingkungan hidup dan SDA dalam kurang lebih 30 tahun menunjukan intensitas yang sangat tinggi. Selama tahun 1984-1997 saja misal jumlah hutan yang rusak

²⁷ Ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

mencapai 16,57 juta hektar per tahun. Dapat disimpulkan bahwa setiap tahun ada sekitar 2.596.500 hektar hutan yang rusak.²⁸

Pendirian pabrik pada lingkungan tertentu memiliki efek terhadap lingkungan sekitar. Pada pendirian bangunan dimulai dengan merubah lahan dengan cara meratakan pohon dan tumbuhan yang diatas tanah sehingga menyebabkan struktur tanah juga berubah. Ketika pabrik sudah didirikan memiliki efek positif diantaranya menambah jumlah tenaga kerja dari warga sekitar lokais pendirian pabrik sehingga meningkatkan pendapatan penduduk. Pendirian pabrik baru juga memiliki efek negatif yang ditekan seminimal mungkin agar industri tersebut memperhatikan lingkungan.

Kasus perusakan dan atau pencemaran lingkungan tersebut menjadi bahaya terhadap kesejahteraan masyarakat. Perusakan atau pencemaran terhadap sumber daya hayati, maupun nonhayati akan menyebabkan habisnya atau punahnya sumber daya tersebut, dan kalau ini terjadi yang mengalami kerugian tidak hanya satu-dua orang saja, melainkan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dari aksi pemberdayaan secara maksimal.

²⁸ Suwiryono Ismail. **Prospek Penegakan Hukum Lingkungan di Indoensia**, Majalah Advokasi Lingkungan Tanah Air. Nomor 08 Th. XX/2000. Walhi. hlm 27, dalam Muhamad Erwin. 2008. **Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup**. Bandung . Refika Aditama. hlm 115.

C. Tinjauan Umum Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Upaya penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup adalah dengan melakukan upaya penyelesaian terhadap sengketa lingkungan hidup. Ketentuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini diatur UUPH menyatakan bahwa “penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.”²⁹

Ketentuan pasal di atas memberikan gambaran bahwa UUPH memberikan opsi (pilihan) kepada para pihak yang bersengketa mengenai lingkungan hidup untuk menentukan pilihan mereka dalam menempuh penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dilakukan dengan tujuan agar tercapainya kesepakatan dalam hal bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk menjamin agar tidak terjadi lagi munculnya efek negatif lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan bisa dilakukan dengan perantara pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang dimiliki kewenangannya untuk mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketalingkungan hidup.

Penegakan hukum dalam bahasa inggris disebut dengan *Law Enforcement*, pengertian penegakan hukum dalam terminologi bahasa Indonesia selalu mengacu pada *Force*, sehingga timbul kesan di masyarakat bahwa penegakan hukum yang berkaitan erat dengan sanksi pidana, salah satunya yaitu muncul kesan harus

²⁹ Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

berurusan dengan polisi, jaksa, dan hakim. Padahal, pejabat administrasi (birokrasi) sebenarnya juga bertindak sebagai penegak hukum dapat berupa penegakan yang bersifat preventif, yang dilakukan dengan tindakan berupa sosialisasi terhadap peraturan perUUan yang berasal dari pusat maupun daerah.³⁰

Dalam konteks UUPLH yang baru dan lama, tidak diketemukan terminologi mengenai penegakan hukum itu secara harfiah. Namun demikian untuk memberikan kejelasan mengenai pengertian penegakan hukum tersebut, akan diambil pengertian dalam bahasa Belanda yang disebut dengan *Handhaving*. Menurut *Notie Handhaving Milleurecht* bahwa “penegakan hukum adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu.”³¹

Disamping itu dalam terminologi sehari-hari dikenal pula istilah *Compliancem* yang mempunyai arti negosiasi, dan persuasi supaya peraturan tersebut ditaati sebelum penegakan hukum dilakukan. Sehubungan dengan kedua istilah tersebut, orang Amerika dan Kanada membedakan pengertian antara *Law Enforcement* dengan *Compliance*. *Enforcement* berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan *Compliance* berarti tindakan preventif terhadap pelanggaran hukum.³² Yang dalam hal ini dikaitkan dengan konteks penegakan hukum lingkungan. namun demikian, perlu ditelusuri penegakan hukum yang terdapat di Negara Inggris dan Belanda. Bertolak belakang dengan pengertian penegakan hukum dalam perspektif Amerika dan Kanada, Negara Inggris dan Belanda

³⁰ Supriadi. 2008. **Hukum Lingkungan Indonesia**. Jakarta. Sinar Grafika. hlm 267.

³¹ Andi Hamzah. 1995. **Penegakan Hukum Lingkungan**. Jakarta, Arkha Media Cipta. hlm 61.

³² Ibid, hlm 267.

mengangkat kedua frase tersebut merupakan *Handhaving*. Sebelum dilakukan tindakan represif, maka dilakukan tindakan meliputi baik represif maupun preventif. Penyidikan dan penerapan sanksi administratif dan pidana merupakan bagian penutup penegakan hukum (*Handhaving*).³³

Berangkat dari ulasan mengenai penegakan hukum di atas, maka lebih khusus teori demikian memunculkan gambaran bahwa penegakan hukum (*Law Enforcement /Handhaving*) lingkungan hidup adalah mata rantai terakhir dalam skema pengaturan perencanaan kebijakan (*Policy Planning*) tentang lingkungan, yang memiliki tahapan sebagai berikut:

- a. Perundang-undangan (*Legislation: wet en regelgeving*);
- b. Penentuan standar (*Standard Setting: Normzetting*);
- c. Pemberian izin (*Licensing: Vergunning-Verlening*);
- d. Penerapan (*Implementation: Uitvoering*); dan
- e. Penegakan Hukum (*Law Enforcement: Rechthandhaving*)

³³ Ibid, hlm 268

Gambar 1, Kerangka penegakan Hukum Lingkungan



Sumber: Diolah dari data sekunder, 2018

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang mata rantai pengaturan hukum lingkungan di atas, maka peraturan perundang-undangan merupakan awal dari suatu mata rantai yang akan mempengaruhi mata rantai yang lainnya. Oleh karena itu kalau dicermati dalam bagan *Regulatory Chain* di atas, ternyata hukum lingkungan merupakan hukum modern, karena komponen hukum seperti hukum administrasi, pidana, Perdata turut menjadi unsur kajian dalam Hukum Lingkungan. dan penegakan yang dimaksud dalam Hukum lingkungan diawali dengan mengamati melalui Pemeriksaan (*Inspection*) dan pengawasan (*Supervision*) serta melalui deteksi penanggaran hukum, pemulihan kersakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat (*Dader; Offender*).³⁴

³⁴ Ibid Hlm 269

Bertolak dari sengketa lingkungan yang terjadi, maka penyelesaiannya bisa melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan (musyawarah) dan ditinjau dari bentuk perkaranya, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan acara perdata, acara pidana atau acara administrasi.

1. Jalur diluar Pengadilan

Penyelesaian di luar pengadilan atau bisa disebut dengan jalur musyawarah dapat dilakukan sukarela oleh para pihak yang bersengketa, dimaksudkan penyelesaian kasus lingkungan tanpa melalui putusan pengadilan.

Di negara Amerika Serikat Jepang, dan Kanada dalam penyelesaian kasus lingkungan lebih megutamakan penggunaan *Enviromental Mediataion* (mediasi lingkungan). Yaitu hal yang sebaiknya dilakukan untuk mengakhiri sengketa dengan bantuan fasilitator (mediator).

Dengan demikian karakteristik mediasi lingkungan ini pada prinsipnya adalah (1) kesukarelaan, (2) persetujuan, dan (3) prosesnya tidak mengikat. Prinsip penyelesaian secara sukarela ini dimaksudkan agar pada pihak tidak memaksakan kehendaknya untuk menyelesaikan kasus. Perundingan dilakukan dengan cara kekeluargaan dan bebas dari prasangka buruk. Persetujuan yang diapai merupakan hasil dari perundingan yang dilakukan dengan bantuan mediator yang tidak memihak.

Dengan berlakunya UUPH tahun 1997, ketentuan mediasi ini kembali diatur dalam pasal 32 yang menyatakan bahwa penyelesaian

sengketa di luar pengadilan ini bisa meminta bantuan kepada pihak ketiga yang harus netral yang berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkaitan, sehingga diharapkan dapat mencapai kesepakatan. Adapun persyaratan untuk menjadi pihak ketiga ini yaitu:

- a. Telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa;
- b. Tidak mempunyai hubungan kerja dan/atau hubungan keluarga dengan salah-satu pihak;
- c. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan; dan
- d. Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses selama perundingan maupun hasil perundingan.

Alternatif penyelesaian kasus lingkungan secara mediasi menurut UUPLH adalah berkaitan dengan penerapan sanksi perdata berupa pembayaran ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh persak atau pencemar lingkungan hidup terhadap korban. Sebaliknya, penyelesaian secara mediasi ini tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan aspek pidananya.

2. Jalur pengadilan

Penyelesaian kasus lingkungan melalui proses pengadilan adalah cara terakhir yang dapat dilakukan setelah kesepakatan melalui jalur musyawarah tidak berhasil. Hal ini juga tercantum dalam penjelasan UUPLH bahwa “bilamana tim yang terdiri atas pihak penderita atau kuasanya, dan unsur pemerintah tidak mencapai kata sepakat dalam batas waktu tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui pengadilan negeri”.³⁵ Keputusan hakim terutama dalam kasus pidana diharapkan akan sangat berpengaruh dalam rangka mengefektifkan sanksi, baik dalam fungsi preventif maupun represif.

Dalam kasus perdata, hakim bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara masih diharapkan untuk menjalankan fungsi mediator. Landasan hukumnya tercantum dalam pasal 14 ayat (2) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.” Dengan demikian hakim dalam tugas pokoknya untuk memeriksa dan mengadili perkara memiliki dua fungsi pokok yaitu berfungsi yudikatif dan mediator.

“Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh melalui upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa”.³⁶

Dengan demikian hakim dalam tugasnya untuk memeriksa dan mengadili perkara memiliki dua fungsi pokok yaitu fungsi yudikatif dan fungsi mediator. Selain kasus perdata di atas, dalam hal terjadinya kasus tindak pidana lingkungan, pada prinsipnya harus diselesaikan melalui pengadilan.

³⁵ pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁶ Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Tinjauan Umum Hak Dan Kewajiban Masyarakat Dalam Prespektif Hukum Lingkungan

Membahas tentang implikasi Undang-undang Pengelolaan Lingkungan hidup, berkaitan dengan penerapan ketentuan-ketentuan yang dimaktub dalam UU tersebut di tengah-tengah masyarakat. Misalnya dalam penerapan atau implikasi praktik hak dan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup karena salah satu SDA yang memiliki peran sangat strategis terhadap keberadaan makhluk hidup, termasuk manusia. Oleh karena itu manusia sebagai subyek lingkungan hidup memiliki peran penting atas kelangsungan lingkungan hidup. UUPLH telah memberikan peran kepada manusia untuk memberikan perannya dalam pengelolaan lingkungan, hal demikian sesuai dengan ketentuan bahwa setiap orang memiliki kesamaan hak dalam lingkungan hidup yang sehat.³⁷ Hak atas lingkungan yang sehat dan baik ini berkaitan pula dengan hak atas informasi lingkungan hidup dan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.³⁸ Sehubungan dengan informasi lingkungan hidup penjelasan pasal 65 ayat

(2) menyatakan bahwa:

“Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan

³⁷ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 ayat (1) bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

³⁸ Ibid, Ayat (2)

penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.”

Dalam ketentuan pasal tersebut telah jelas bahwa hak atas lingkungan³⁹ yaitu hak setiap masyarakat(subjektif) yang harus dipertahankan untuk mendapat perlindungan terhadap gangguan yang berasal dari luar. Heinhard Steiger C.s menyatakan bahwa hak-hak subjektif (*Subjective Rights*) yaitu sebuah bentuk perlindungan seseorang. Hak tersebut diberikan agar dapat mengajukan tuntutan terkait lingkungan hidup agar terciptanya kondisi normal kembali, tuntutan dapat didukung dalam prosedur hukum dengan mewujudkan perlindungan hukum oleh

³⁹ Dalam BAB X tentang HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 65 (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66 Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Pasal 67 Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 68 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

(1) Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.⁴⁰ Lebih jauh tuntutan dengan pola ini memiliki dua fungsi yang berbeda. *Pertama*, dikaitkan pada hak untuk membela diri terhadap gangguan yang berasal dari luar mengakibatkan kerugian pada lingkungan, hal ini diatur dalam pasal 91 UUPH, sedangkan Fungsi *Kedua* dikaitkan apda hak menuntut dilakukannya tindakan segera agar dapat dilestarikan, dipulihkan, atau diperbaiki pada lingkungan.⁴¹



⁴⁰ Heinhard Steiger, et al. 1980. **The Fundamental Right To a Decent Environment**, dalam **Trends In Environemntal Policy On Law**, IUCN, Gland, Swizerland. hlm 3, Dalam Koesnadi Hardjasoemantri. 1993. **Hukum Tata Lingkungan**, Edisi Ke 5, Gadjah Mada University Press. hlm 128.

⁴¹ Dalam teks asli tulisan ini berbunyi (1) *the function of defense (abwehrfunktion) the right of the individual to defend himself agains an interference with his environment wich is to his disadvantage*; (2) *the function of performance (leistungfunktion), the right og the individual to demand the performance of an act in order to preserve, to restore, or to improve his environment*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode dalam penyusunan penelitian oleh peneliti menggunakan metode yuridis sosiologis. Adapun metode yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*Fact-Finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*Problem-Finding*), kemudian diteruskan pada identifikasi masalah (*Problem- Identification*), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*Problem Solution*).⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di lokasi yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Fakta yang didapat berkaitan dengan kesenjangan sosial, serta tentang efektifitas model penyelesaian sengketa yang dipilih oleh pemerintah, masyarakat, maupun PT. Usaha Loka dalam pengolahan limbah. Sehingga

⁴² Soejono Soekanto. 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta . UI-Press. hlm 10.

dalam mencari dan mengetahui implementasi kebijakan tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan agar sesuai dengan harapan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor kelurahan Ciptomulyo. Dengan berdasarkan informasi yang diperoleh penulis saat melakukan penelitian di lokasi tersebut, penulis menemukan bahwa tingkat pencemaran limbah cair di sungai kelurahan Ciptomulyo sangat parah. Hingga menimbulkan bau yang tidak sedap hingga sekarang ini. Dan belum ada penanganan dari pihak Pabrik Kulit PT. Usaha Loka lebih lanjut.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer yaitu data-data yang didapatkan dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan berkerjanya suatu hukum yang nyata.⁴³ Data diperoleh langsung dari responden yang berada di lokasi penelitian melalui hasil penelitian lapang dan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu pihak pihak yang berkaitan langsung dengan pemilihan model penyelesaian sengketa.

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 59

b. Data sekunder yaitu data-data yang didapat dari studi pustaka yang berupa literatur, penelitian ilmiah, perundang-undangan, serta dokumen pendukung yang diperoleh dalam penelitian ini.⁴⁴ Data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk melengkapi, serta mendukung dan memperkaya sumber data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data sekunder ini terdiri dari:

1. Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi;
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140;
2. Buku-buku kepustakaan, hasil penelitian serta berbagai tulisan yang relevan dengan penelitian; dan
3. Artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian.
 - c. Data tersier adalah data yang diperoleh dari bahan hukum berupa kamus dan ensiklopedi.

⁴⁴ Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, *Op Cit*, hlm 12

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Pengumpulan data primer untuk penelitian ini menggunakan tehnik interview yakni melakukan wawancara langsung dengan responden. Responden adalah seseorang atau individu yang terkait langsung dengan data yang dibutuhkan dan akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan.⁴⁵ Responden yang dimaksud adalah anggota lembaga organisasi desa yang ditunjuk dan dibentuk oleh kepala pihak pabrik kulit PT. Usaha Loka, Masyarakat, dan Pemerintah dalam menjalankan haknya melakukan penegakan hukum Lingkungan di wilayah sampel penelitian. *Interview* dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan sistem terbuka sehingga pertanyaan-pertanyaan yang belum tercantum dapat ditanyakan untuk memperoleh data yang akurat dan tepat guna menunjang analisis terhadap permasalahan yang dibahas.

b. Studi pustaka

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi literatur yang berkorelasi dengan penelitian. Studi ini dimaksudkan agar peneliti mendapat landasan teori yang cukup guna mendukung analisis penelitian yang bermaksud untuk memberikan alternatif arah model penyelesaian sengketa lingkungan Pabrik Kulit PT. Usaha Loka. Selain itu, teori yang dimaksud juga bertujuan untuk memberikan ukuran

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Hukum Normatif dan Empiris**, *Op Cit*, hlm 161.

keefektifan model penyelesaian sengketa sebagai bentuk akomodasi dari UUPLH.

F. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan data yang memiliki ciri-ciri sama. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan alternatif arah model penyelesaian sengketa lingkungan Pabrik Kulit PT. Usaha Loka dengan masyarakat kelurahan Ciptomulyo.

b. Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan merupakan gambaran dari populasinya. Pemilihan subjek penelitian disini menggunakan *purposive sampling* yang disengaja dengan maksud untuk memperoleh data yang benar, pihak-pihak yang dijadikan sampel, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 5 (lima) orang dari warga kelurahan Ciptomulyo dan juga mewawancarai seorang yang mewakili pihak PT. Usaha Loka yang bertugas bagian Pengolahan Limbah serta seorang kepala kelurahan Ciptomulyo .

c. Teknik Sampling

Purposive sampling adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang

erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan terhadap data-data yang diperoleh adalah dengan cara:

- a. data primer dan data tersier dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang mencoba memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan kepada data yang berwujud kasus-kasus (kualitatif) ⁴⁶ untuk kemudian dianalisis menjadi sebuah kesimpulan umum. Melalui pendekatan ini, juga akan dipaparkan lebih dahulu mengenai kondisi lapang yang kemudian dianalisis dan diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh;
- b. data sekunder dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu teknik analisis yang mencoba memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang berjumlah besar dan mudah dikategorikan dalam sebuah kategori-kategori tertentu dan oleh karenanya, data yang demikian menjadi data yang terstruktur dan sistematis.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, hlm 167

⁴⁷ Soetandyo Wignjosoebroto. **Pengelolaan dan Analisa Data**. Dalam Koentjaraningrat. 1977. **Metode Penelitian Masyarakat**. Cetakan Kedua. Jakarta. P.T. Gramedia. hlm 328-329.

H. Definisi Operasional

- a. Sengketa adalah sengketa lingkungan hidup antara Pabrik Kulit PT. USAHA LOKA dengan warga kelurahan Ciptomulyo.
- b. Lingkungan Hidup yaitu sebuah kesatuan ruang yang terdiri dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memiliki pengaruh kepada alam itu sendiri, kesejahteraan manusia, dan kelangsungan perikehidupan serta makhluk hidup lain.
- c. Bau Limbah adalah bau yang menurut masyarakat kelurahan Ciptomulyo tidak dikehendaki yang mana berasal dari limbah Pabrik Kulit PT. USAHA LOKA.
- d. Model Penyelesaian sengketa adalah cara-cara penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan antara warga kelurahan Ciptomulyo dengan Pabrik Kulit PT. USAHA LOKA melalui litigasi dan non litigasi.

BAB IV

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PABRIK KULIT PT. USAHA LOKA (Studi di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Malang)

1. Gambaran Umum Kelurahan Ciptomulyo Malang

Kota Malang memiliki letak geografis yaitu antara 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan antara 7,06°-8,02° Lintang Selatan dengan luas wilayah kurang lebih 110,06 Km² yang terbagi kedalam lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sukun, Kedungkandang, Blimbing, Klojen, dan Kecamatan Lowokwaru. Kota Malang memiliki batas-batas wilayah mencakup utara yaitu Kec. Singosari dan Kec.Karangploso, wilayah barat yaitu Kec. Wagir dan Kec. Dau, sebelah timur adalah Kec. Pakis dan Kec. Tumpang; dan bagian selatan adalah Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji.

Kota Malang terletak didataran tinggi, yaitu antara 440-667 meter di atas permukaan laut. Kondisi iklim Kota Malang pada tahun 2012 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 21,6°C - 24,7°C. Suhu minimum 17,1°C dan suhu maksimum mencapai 29,5°C. Rata-rata kelembaban udara kurang lebih 69% - 85%, dengan kelembaban minimum 28% dan maksimum mencapai 98%. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah timur Kota Malang. Dari atas pegunungan ini terlihat dengan jelas pemandangan Kota Malang yang sangat indah, termasuk juga pemandangan barisan Gunung Kawi dan Panderman di sebelah barat, barisan Gunung Semeru di sebelah timur, dan pemandangan Gunung Arjuno di sebelah utara.

Kelurahan Ciptomulyo merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang. Secara geografis Ciptomulyo berada di ketinggian kurang lebih 450 meter di atas permukaan laut. Rata-rata suhunya berkisar antara 23 °C-30°C. Curah hujan di kelurahan ini sekitar 210,00 mm dengan tingkat kelembapan 20,00.⁴⁸ Secara administratif, Kelurahan Ciptomulyo dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang yaitu wilayah utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kasin dan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun. Kelurahan Ciptomulyo memiliki luas tanah mencapai kurang lebih 229,50 Ha. Kelurahan tersebut dihuni oleh 3.744 orang KK (Kepala Keluarga) yang terbagi atas 5 RW dan 62 RT. Penduduk Ciptomulyo terdiri dari 8.276 orang pria dan 8.487 orang wanita. Kelurahan Ciptomulyo dengan penduduk total kurang lebih 19.220 jiwa dengan membutuhkan air bersih setiap hari sesuai dengan tabel dibawah ini, yaitu:

⁴⁸ Dhayal Gustopo Setiadjit , Faidliyah Nilna Minah, dan Taufik Hidayat. 2015. **IbM Kelurahan Ciptomulyo Kota Malang Dalam Mengolah Daun Tanaman Aloe Vera Sebagai Bahan Utama Komoditas Produk Makanan**. Volume 05, Nomor 02. *INDUSTRI INOVATIF*. hlm 13.

Tabel 2.
Perhitungan Kebutuhan Air Kecamatan Sukun

| No | Kelurahan | Jumlah Penduduk | Kebutuhan Air |
|------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Jiwa | (L/hari) | (L/detik) | (m ³ /detik) |
| 1 | Ciptomulyo | 19,220 | 3,267,385 |
| 2 | Gadang | 21,850 | 3,714,480 |
| 3 | Bandungrejosari | 32,266 | 5,485,300 |
| 4 | Sukun | 21,655 | 3,681,332 |
| 5 | Tanjungrejo | 29,863 | 5,076,679 |
| 6 | Pisang Candi | 21,314 | 3,623,325 |
| 7 | Bandulan | 16,116 | 2,739,789 |
| 8 | Karang Besuki | 20,831 | 3,541,245 |
| 9 | Mulyorejo | 15,348 | 2,609,172 |
| 10 | Bakalan Krajan | 8,821 | 1,499,524 |
| 11 | Kebon sari | 10,117 | 1,719,915 |

Sumber: Diolah dari data sekunder, 2018

Pada kondisi eksisting terdapat beberapa pipa yang memiliki kecepatan dibawah 0.01. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan air belum terlalu banyak, sedangkan diameter pipa terpasang kurang lebih 200 mm.⁴⁹

Kelurahan Ciptomulyo dipimpin oleh seorang Lurah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Lurah Ciptomulyo dibantu oleh staf dengan jumlah 10 orang dalam pengurusan administrasi kependudukan yang beralamatkan di Jl. Kolonel Sugiono, Kecamatan Sukun, Kota Malang kodepos 65148. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor telepon kantor 0341-322175, mengirimkan faks ke 0341-322175, mengirimkan email ke kelciptomulyo@malangkota.go.id, atau melihat laman resminya di <http://kelciptomulyo.malangkota.go.id>.

⁴⁹ Fahir Hassan, dan Ali Masduqi. 2014. **Pemodelan Penurunan Sisa Chlor Jaringan Distribusi Air Minum Dengan EPANET (Studi kasus Kecamatan Sukun Kota Malang)**, Volume 03 Nomor 02. JURNAL TEKNIK POMITS. hlm 189.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Kelurahan Ciptomulyo memiliki mitra kerja meliputi bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga masyarakat, hingga pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Selain itu, ada organisasi sosial kemasyarakatan antara lain karang taruna, karang werda, kader lingkungan, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan), PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), KKB (Kader Keluarga Berencana), BKB (Bina Keluarga Balita), Tokoh Masyarakat, Gerdu Taskin, PLKB, Dasawisma, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dan lain-lain.⁵⁰

Visi Kelurahan Ciptomulyo yaitu terwujudnya Ciptomulyo sebagai Kelurahan Sehat, Berbudaya, Asri dan Aman dalam rangka Menuju Masyarakat yang Bermartabat. Kelurahan Ciptomulyo ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang sebagai kawasan Industri dan Perdagangan . Warga produktif dan agamis. Kondisi tersebut berdampak terhadap kondisi sosial ekonominya berdasarkan PPLS 2014 RTS/KK Miskin 80 KK atau 2,13 % menunjukkan kemiskinan terendah di Kota Malang, Lurah Ciptomulyo (Ir. Wahyudi Sudiono) telah menetapkan 4 (empat) prioritas sentra Usaha antara lain⁵¹:

1. Pengrajin Kulit

Usaha dibidang kulit dimulai dari Hulu sampai Hilir diawali dari persediaan bahan baku Kulit sebagian berasal dari RPH , Penyamakan kulit (Pt. Usaha Loka & Pt. Kasin), Pengrajin Sepatu yan dikelola UKM Herkules & Samba

⁵⁰ <http://ngalam.co/2016/06/01/profil-kelurahan-ciptomulyo-kecamatan-sukun-kota-malang/>, diakses tanggal 20 April 2018 pukul 09.11 WIB.

⁵¹ <https://kelciptomulyo.malangkota.go.id/2016/03/22/ciptomulyo-menuju-otonomi-award-2016/>, diakses tanggal 20 April 2018 pukul 10.28 WIB.

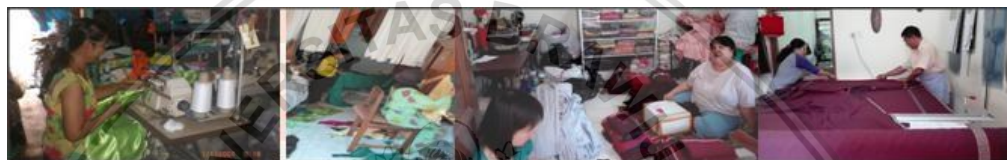
2. Kampung Aloe Vera

Kelurahan Ciptomulyo bekerja sama dengan ITN, membentuk Posdaya Agropolitan Ciptomulyo dengan pemberdayaan PKK dimulai dari budidaya tanaman Aloe Vera sampai dengan Pengelolaan Aneka Olahan Aloe Vera.

3. Usaha Konveksi

Usaha konveksi di Kelurahan Ciptomulyo dilakukan oleh kurang lebih 27 pelaku UKM yang menghasilkan Korden, kaos, baju, celana panjang atau jin , dan bordir.

Gambar 2.Usaha Konveksi Kelurahan Ciptomulyo



Sumber: Diolah dari data sekunder, 2018

4. Usaha kue semprit & Bumbu Pecel

Kue semprit & Bumbu Pecel juga unggulan produk makanan di Kelurahan Ciptomulyo.

Gambar 3.Usaha kue semprit & Bumbu Pecel



Sumber: Diolah dari data sekunder, 2018

Di Kelurahan Ciptomulo Kota Malang terdapat sungai yang memiliki nama unik, warga menyebutnya kali atau sungai Badek yang berasal dari anak Sungai Metro sehingga tergolong sungai kecil dengan aliran yang tenang dan stabil. Sungai Badek hingga sekarang ini terjadi penurunan kualitas air dikarenakan tercemar limbah cair dari pabrik penyamakan kulit yang sering membuang limbah cair langsung di Sungai Badek sehingga merusak ekosistem sungai dan membuat warga Kelurahan Ciptomulyo menjadi resah di sepanjang aliran sungai Badek. Industri penyamakan kulit tersebut menghasilkan limbah cair dari proses produksi dimana limbah cair tersebut masuk kategori limbah berbahaya dan beracun (B3) terhadap lingkungan. Pembuangan limbah cair ke sungai Badek sebanyak 2 (dua) -3 (tiga) kali pembuangan per bulan sesuai dengan kondisi jumlah produksi pabrik tersebut dengan kandungan bahan kimia yang tergolong logam berat yang tinggi sehingga terjadi pengendapan langsung dengan ciri-ciri menimbulkan bau menyengat yang tidak sedap dan warna biru kehitaman. Limbah cair tersebut berasal dari dua pabrik yang sudah lama berdiri di daerah tersebut, yakni pabrik PT Kasin dan PT. Usaha Loka. Padahal sungai Badek masuk kedalam golongan kelas III yang diperuntukkan sebagai peternakan, pembudidayaan ikan air tawar, dan air untuk pertanian.⁵²

Warga Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang mengeluhkan limbah pabrik kulit dari PT Kasin dan PT Usaha Loka yang mencemari lingkungan dan menimbulkan bau tidak sedap. Menurut Ketua RT 06 RW 01 Kelurahan Ciptomulyo Imam Bachroni, warga yang terkena dampak

⁵² Valens Ngali Prasetya, Liliya Dewi Susanawati. **Penentuan Daya Tampung Sungai Badek Terhadap Beban Pencemar Akibat Limbah Cair Penyamakan Kulit di Kelurahan Ciptomulyo, Malang**. Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan . Universitas Brawijaya. hlm 8.

limbah kedua pabrik tersebut sekitar 500 jiwa yang tersebar di wilayah RT 04, 06, 09, dan 12 RW 01. Air limbah dari pabrik melewati pemukiman warga. Selain membuat air sumur warga menjadi keruh, baunya juga menyengat, sehingga banyak warga yang terserang infeksi saluran pernafasan atas. Warga khawatir limbah pabrik akan memberikan dampak yang lebih buruk lagi. Apalagi mayoritas warga yang tinggal di sekitar pabrik masih menggunakan air sumur. Akibat adanya penceraan limbah dari kedua pabrik tersebut, air sumur yang selama ini menjadi penopang utama kebutuhan air bersih warga menjadi tidak layak konsumsi. Limbah pabrik yang mencemari kawasan pemukiman warga sudah terjadi sejak puluhan tahun, namun hingga sekarang belum ada pengananannya. Warga sudah dua kali melapor ke dewan.

Menanggapi keluhan warga tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Arif Wahyudi mengatakan pihaknya akan segera memanggil pemilik pabrik serta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Malang agar permasalahan tersebut bisa dituntaskan. Pihaknya sudah pernah meminjam lokasi dan memang merugikan warga. Pemerintah akan memanggil pihak-pihak terkait untuk penyelesaian permasalahan ini agar tidak berlarut-larut dan warga juga tidak dirugikan. Sementara itu, Kepala BLH Kota Malang mengakui pihaknya memang belum melakukan uji kualitas air di kawasan Ciptomulyo. Sampai sekarang memang belum ada uji kualitas air di kawasan itu, namun dalam waktu dekat ini akan melakukan uji kualitas air sumur. Ada 30 titik sumur di Kota Malang yang akan

dijui kualitas airnya dan salah satunya adalah sumur di kawasan industri, seperti di Ciptomulyo.⁵³

Setelah ditinjau lanjuti oleh pihak-pihak tersebut, pernyataan langsung dari kepala BLH kota Malang yang dimuat dalam surat kabar Harian Malang Post tanggal pada tanggal 24 Februari tahun 2014 yang menyatakan bahwa hasil uji yang dilakukan di Laboratorium Jasa Tirta, limbah pabrik kulit PT Usaha Loka dan air yang mengalir di Sungai Badek melebihi standar baku mutu air limbah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam lingkup kegiatan industri. “Hasilnya tidak memenuhi syarat baku mutu yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jatim Nomor 72 Tahun 2013. Dari tiga cairan yang jadi rujukan indikator, limbah tersebut terbukti mengandung tingkat keasaman melebihi skala normal. Umumnya PH air di kisaran 6-9. Sedangkan dari hasil uji laboratorium kualitas air di perum jasa tirta tahun 2014 standar keasaman mencapai 61,30 mg/l melebihi baku mutu gubernur yang menetapkan 50 mg/l. Sehingga kesimpulanya, pengelolaan limbah yang dibuang ke kali badek tetap di atas ambang batas rata-rata.”⁵⁴

Jika ditinjau dari segi sejarah berdirinya kelurahan Ciptomulyo tersebut, pabrik didirikan mulai tahun 1900an, ketika zaman penjajahan Belanda. Sedangkan kampung Ciptomulyo dulunya adalah lahan hijau. Kampung tersebut didirikan oleh pak Tomporejo pada zaman penjajahan Belanda. Oleh pemerintahan Belanda, beliau diberi kekuasaan untuk mengelola tanah tersebut.

⁵³ <https://jatim.antaranews.com/berita/125370/warga-malang-keluhkan-limbah-pabrik-kulit>, Diakses tanggal 21 April 2018 pukul 20.59 WIB.

⁵⁴ Redaksi. Pemkot Ancam Larang Buang Limbah di Kota Malang. Radar Malang. Jawa Pos Group. 29 Agustus 2014. Hal. 43.

sehingga warga pribumi mulai membangun perkampungan atas izin pak Tomporejo. Sungai Ciptomulyo mengalir dari RW 01, RW 02 dan RW 05. Di RW 01 sungai tersebut berukuran lebar hingga 10 meter. Sedangkan di RW 02 dan RW 05 hanya berukuran lebar kurang lebih 3 meter. Dari pihak pabrik sudah membangun saluran pipa yang ditaruh didalam sungai. Dan dilakukan pengecoran pipa karena masih ada keluhan dari warga karena masih menimbulkan bau. Ide pipa tersebut dicanangkan pada tahun 2011. Tetapi baru terealisasi pada tahun 2014 setelah ada demo. Sebelumnya pihak pabrik akan membuat bak atau penampung limbah yang diajukan oleh warga sekitar, tetapi proposal tersebut tidak terealisasi.

55

Menurut keterangan warga kelurahan Ciptomulyo berpendapat bahwa di RW 01 diatas sungai dicor dan diatas cor tersebut ditata beberapa pot tanaman yang bertujuan untuk menghilangkan bau tidak sedap. Tetapi, sampai sekarang masih menimbulkan bau tidak sedap. Walaupun menggunakan pipa, masih tetap bau, selain itu dampaknya yaitu barang elektronik cepat rusak, sumur rumah tercemar. dari pihak PT Kasin memberi bantuan air bersih yang disalurkan melalui pipa kepada salah satu warga sejak tahun 2013.⁵⁵ Ada juga yang berpendapat Sumur tercemar, barang elektronik cepat rusak dan tidak mendapatkan bantuan air bersih. Warga tidak berani melakukan gugatan perdata karena pasrah dan belum tahu alur untuk mengajukan gugatan seperti apa dan jalur tempuh hukum seperti apa saja.⁵⁷ Sampai sekarang, aliran sungai masih

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Pak Lurah Ir. Wahyudi Sudiono.pada tanggal 20 April 2018.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan warga RW 02 Ira Sudiono.pada tanggal 19 April 2018.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan warga RW 05 Rukiati pada tanggal 19 April 2018.

menimbulkan bau tidak sedap dan aliran sungai juga tidak lancar dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 4. Kondisi Sungai Badek Kelurahan Ciptomulyo



Sumber: Diolah dari data sekunder, 2018

Gambar 5. Kondisi Barang-Barang Yang Terkena Efek Limbah Kelurahan Ciptomulyo



Sumber: Diolah dari data sekunder, 2018

2. Gambaran Umum PT. USAHA LOKA

Pabrik kulit PT Usaha Loka diresmikan pada tanggal 14 Februari 1990. Pabrik tersebut bergerak dalam bidang penyamakan kulit yang hingga sekarang kelurahan Ciptomulyo terkenal dengan produksi sepatu kulit dan jaket kulit. Menurut keterangan pekerja yang bertugas pada bagian pengolahan limbah, beliau menjelaskan bahwa limbah dibagi menjadi dua, yakni limbah cair dan padat. Limbah cair diolah melalui sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sebelum dibuang ke sungai. Pengecekan dilakukan sebulan sekali di Laboratorium yang terakreditasi yakni di Laboratorium Jasa Tirta Malang yang beralamat di Jl. Surabaya No.2A, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dan telah dipantau oleh BLH (Badan Lingkungan Hidup) yang disesuaikan dengan standar baku mutu limbah yang diperbolehkan dibuang di sungai.⁵⁸ Gambar system pengolahan limbah dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 6. Sistem Pengolahan Limbah Cair PT Usaha Loka



Sumber: Diolah dari data sekunder, 2018

⁵⁸ Hasil wawancara dengan pekerja pabrik kulit PT .Usaha Loka Sudiono pada tanggal 21 April 2018.

Parameter kandungan limbah cair tersebut antara lain COD, BOD, TSS, amoniak, sulfida dan minyak lemak. Limbah cair yang sebelum dibuang kesungai melalui pipa harus berdasarkan standart yang diatur yaitu:

- a. COD 250 (mgL-1)
- b. BOD 100(mgL-1)
- c. TSS 100(mgL-1)
- d. Amoniak 10(mgL-1)
- e. Sulfida 0,8(mgL-1)
- f. Krom 0,5(mgL-1)
- g. Ph 6-9
- h. Minyak lemak 0,5 (mgL-1)

Pembuangan limbah cair di sungai dilakukan mulai pukul 08.00 – 21.00 WIB secara bertahap. Zaman Industrialisasi menjadi ancaman utama terhadap lingkungan hidup karena mengasilkkan beberapa masalah polusi dan pencemaran, sebagai contoh yaitu industri dalam bidang jasa penyamakan kulit yang menggunakan bahan kimia ketika proses produksi. Dalam pengelolaan limbah tidak melaksanakan berbagai prosedur yang sudah diatur dalam perUUan. Pengelolaan limbah hasil produksi yang sesuai tersebut menyebabkan berbagai masalah yang berkaitan dengan lingkungan, bahan buang limbah berbahaya (B3) misalnya. Yang dimaksud dengan limbah B3 yaitu “zat, atau bahan-bahan lain yang sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya dapat mencemarkan lingkungan

hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup baik manusia dan makhluk hidup lain”.⁵⁹

Meninjau pengertian Limbah B3 tersebut dapat dijelaskan bahwa limbah B3 tergolong berbahaya yang berdampak pada kesehatan, lingkungan hidup, dan jika merujuk dampak kesehatan kepada manusia khususnya, limbah B3 yang di buang ke dalam aliran sungai atau waduk dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, mulai dari penyakit ringan antara lain diare, gatal-gatal, hingga berupa cacat genetik pada generasi mendatang. Serta jika dilihat dari kualitas air akan menyebabkan berbagai permasalahan diantaranya penurunan kualitas air permukaan dan juga air resapan.

Salah satu hasil penelitian oleh pihak kampus di Malang telah meneliti dan menghasilkan data penelitian sebagai berikut. BLH Kota Malang selaku perwakilan pemerintah yang bertugas untuk memantau dan meninjau sungai Badek telah menetapkan bahwa Sungai Badek tergolong sungai dengan kelas III yang diepruntukkan sebagai pembudidayaan ikan, peternakan, dan tanaman yang disesuaikan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2010.

Penentuan status mutu air sungai berdasarkan hasil perhitungan Indeks Pencemaran dapat menunjukkan tingkat pencemaran Sungai Badek dengan membandingkannya sesuai baku mutu kelas air yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001. Sehingga dapat diperoleh

⁵⁹ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

informasi dalam menentukan dapat atau tidaknya air sungai dipakai untuk peruntukan tertentu sesuai dengan baku mutu peruntukan kelas III. Syarat-syarat atau kriteria Indeks pencemaran lingkungan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. Kriteria Indeks Pencemaran (Pij)

| Nilai IP | Mutu Perairan |
|------------|---------------|
| 0 -1.0 | Kondisi Baik |
| 1.0 – 5.0 | Cemar Ringan |
| 5.0 – 10.0 | Cemar Sedang |
| >10.0 | Cemar Berat |

Sumber : Diolah dari data sekunder, 2018

Pada kasus pencemaran sungai Badek, limbah masuk ke badan sungai melalui saluran pembuangan berwujud limbah cair yang dihasilkan dari pabrik penyamakan kulit ke aliran sungai Badek. Pada tabel 4 terdapat indikator rata-rata konsentrasi limbah cair dengan indikator zat-zat antara lain TSS, pH, BOD, DO dan COD telah melebihi baku mutu yang termuat dalam Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup RI No.5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah buangan. indikator suhu masih sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan.⁶⁰Ciri-ciri limbah cair dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

⁶⁰ Valens Ngali Prasetya, Liliya Dewi Susanawati. **Penentuan Daya Tampung Sungai Badek Terhadap Beban Pencemar Akibat Limbah Cair Penyamakan Kulit di Kelurahan Ciptomulyo, Malang**. Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan . Universitas Brawijaya. hlm 21.

Tabel 4. Karakteristik limbah cair penyamakan kulit (T0)

| Parameter | Rata-rata | Baku Mutu |
|-------------|-----------|-----------|
| Suhu (°C) | 27.5 | NA |
| TSS (mgL-1) | 751.7 | 60.0 |
| DO (mgL-1) | 1.3 | NA |
| BOD (mgL-1) | 625.4 | 50.0 |
| COD (mgL-1) | 2750.3 | 110.0 |
| pH | 10.3 | 6.0–9.0 |

Sumber: Diolah dari data sekunder, 2018.

Sedangkan hasil dari pengamatan pengukuran kondisi fisik suhu dan debit air, zat kimia DO dan pH jika dibandingkan dengan baku mutu kelas III yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air dapat dilihat dari Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 5. Kualitas Air Sungai Badek

| Parameter | Lokasi Pengambilan sampel | | | |
|---|---------------------------|------|-----------|------|
| | T1 | T2 | Baku Mutu | T3 |
| Debit (m ³ s ⁻¹) | 1.6 | 0.9 | NA | 2.2 |
| Suhu (°C) | 22.5 | 26.7 | NA | 24.4 |
| DO (mgL-1) | 4.6 | 2.3 | 3.0 | 3.4 |
| pH | 7.3 | 8.0 | 6.0-9.0 | 7.6 |

Sumber: Diolah dari data sekunder, 2018

Jumlah debit air di Sungai Badek pada titik-titik yang sudah ditentukan dengan kecepatan aliran pada titik T1 kurang lebih sebesar 0.5 ms⁻¹, pada titik T2 kurang lebih sebesar 0.5 ms⁻¹ dan pada titik T3 sebesar kurang lebih 1.3 ms⁻¹. Kecepatan pada titik T1 dan T2 sama karena kondisi eksisting di lapangan. Sungai Badek ketika diukur memiliki luas yang tergolong kecil pada titik T1 seluas 2.3 m², titik T2 seluas 1.7 m² dan titik T3 seluas 2.8 m². Indikator pengukuran yang digunakan dalam penentuan besar kecilnya status mutu air Sungai Badek antara lain COD, BOD, pH dan TSS. Standar baku yang dipakai yaitu kelas III dengan berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 yang dapat disaksikan pada Tabel 6. Analisis yang dilaksanakan bertumpu pada KLH Nomor 115 Tahun 2003 dengan memakai metode indeks pencemaran.

Tabel 6. Status Mutu Air Sungai Badek

| Lokasi Pengambilan Sampel | Nilai Pij | Status Mutu Air Berdasarkan Kelas III |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Titik 1 (T1) | 0.63 | Kondisi Baik |
| Titik 2 (T2) | 7.36 | Cemar sedang |
| Titik 3 (T3) | 5.45 | Cemar sedang |

Sumber: Diolah dari data sekunder, 2018

Titik T1 di sungai Badek menunjukkan hasil dalam keadaan kondisi baik dan masih sesuai dengan peruntukannya. Pada titik T2 menurut hasil penelitian menunjukkan telah terjadi pencemaran karena pada titik tersebut tempat

bercampurnya air sungai dengan limbah cair penyamakan kulit. Pada titik T3 di sungai Badek juga mengalami pencemaran sedang karena tercampurnya bahan organik maupun anorganik.

Dari penjabaran hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa dari proses pengolahan limbah cair yang berasal dari PT. Usaha Loka masih mengandung tingkat pencemaran sedang. Sedangkan menurut keterangan dari pihak PT Usaha Loka, sistem pengelolaan limbah berjalan baik dan sesuai dengan prosedur. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dilarang karena dapat merusak ekosistem sungai dan pencemaran air yang akan dikonsumsi oleh penduduk sekitar sungai Badek. Sehingga pencemaran limbah cair tersebut dapat mengganggu kesehatan warga kelurahan Ciptomulyo. Dari sini, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan warga kelurahan Ciptomulyo terasa belum menghasilkan maksimal dan belum ada tanggapan serius dari pihak PT. Usaha Loka tersebut. Perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

A. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Antara Pabrik Kulit PT. USAHA LOKA Dengan Masyarakat Ciptomulyo Selama Ini Telah Dilakukan

Air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemenuhan air bersih untuk penduduk suatu wilayah menjadi tantangan bagi pemerintah, apalagi keberadaan air bersih pada saat ini menjadi barang yang langka untuk didapatkan. Salah satu akibat dari ketiadaan air bersih bagi

kesehatan adalah penyakit diare. Di Indonesia diare menjadi penyebab faktor kematian kedua terbesar bagi anak-anak dibawah umur 5 tahun. Kurang lebih 13 juta anak-anak balita mengalami diare setiap tahun. Air yang terkontaminasi zat-zat lain dan pengetahuan yang kurang tentang budaya hidup bersih menjadi akar dari masalah tersebut. Penyakit lainnya adalah penyakit cacangan dan kemiskinan. Rumah tangga yang membeli air dari para penjual air bersih membayar 2-6 kali dari rata-rata yang dibayar bulanan oleh mereka yang mempunyai sambungan saluran pribadi untuk volume air yang hanya sepersepuluhnya.⁶¹

Masalah yang sering timbul yaitu kualitas dan kuantitas air sungai yang semakin menurun. Padahal sumber air di sungai tersebut harusnya dijaga untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat karena memiliki fungsi yaitu sebagai sumber ketersediaan air dan wadah air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, sanitasi lingkungan, industri, perikanan, dan kebutuhan lainnya. Pencemaran air terjadi karena masuknya zat lain ke dalam air sungai. Berdasarkan sumbernya, pencemaran di sungai digolongkan menjadi dua (2), yaitu sumber titik dan non sumber titik sebagai indikator titik buangan atau lokasi tertentu. Sedangkan non sumber titik menunjukkan polusi yang didistribusi dan dibuang melalui air pada sungai. Sungai memiliki kemampuan untuk memulihkan diri dan mampu menerima masukan limbah atau zat lainnya.⁶² Jumlah zat pencemar sungai mempengaruhi daya tampung sungai. Sungai digolongkan menjadi empat kelas. Kelas satu (I) digunakan untuk air minum, dan atau kegunaan yang lain sesuai

⁶¹ Pemerintah Kota Malang, Profil kesehatan kota Malang Tahun 2014, hlm 10, http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2014/3573_Jatim_Kota_Malang_2014.pdf, Diakses tanggal 22 April 2018 pukul 21.00 WIB.

⁶² Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

dengan syarat mutu air. Kelas dua (II) digunakan untuk sarana dan prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, dan air untuk mengairi tanaman. Kelas tiga (III) digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, dan atau peruntukan lain jika memenuhi syarat mutu air. Kelas empat (IV) digunakan untuk mengairi tanaman.⁶³

Pengentasan wilayah kumuh tahun 2016 di Kota Malang akan difokuskan pada Kecamatan Sukun. Dari lima kelurahan yang diusulkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, empat di antaranya berada di kawasan Kecamatan Sukun. Empat kelurahan yang dimaksud yaitu Ciptomulyo, Tanjung, Bandulan, dan Bandungrejosari. Sementara satu kelurahan lain adalah Daerah Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Sayangnya, hingga saat ini, Kemenpera baru mengalokasikan dana APBN sebesar Rp 8,9 miliar untuk pembenahan kawasan kumuh di Ciptomulyo.

Sisanya, masih harus menunggu dana APBN perubahan yang baru akan digedok Juni mendatang. Pada 2015, Kota Malang memperoleh dana pengentasan kawasan kumuh sebesar Rp 30 miliar untuk membenahi tiga kelurahan, yakni Kelurahan Sukun (Kecamatan Sukun) Kelurahan Polehan (Kecamatan Blimbing) dan Kelurahan Tulusrejo (Kecamatan Lowokwaru). Dana yang tersedia dipakai untuk perbaikan akses jalan, saluran air, instalasi pembuangan air limbah (IPAL) komunal mini, dan taman mini. Kemenpera meminta agar dana dipakai untuk peningkatan fisik kelurahan. Untuk peningkatan non-fisik, Pemerintah Kota

⁶³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Malang memakai APBD.⁶⁴ Camat Sukun Priyadi mengatakan, sudah mengecek lokasi pemasangan pipa yang dilakukan pabrik kulit PT Usaha Loka di Kali Badek dan telah memerintahkan ke Lurah Ciptomulyo untuk menghentikan pemasangan pipa tersebut. Pemasangan pipa dilakukan untuk membuang limbah pabrik ke sungai. Padahal Badan Lingkungan Hidup meminta pemasangan pipa dihentikan lebih dulu. Harus ada tindakan tegas dari BLH kepada pabrik kulit karena sesuai kesepakatan tidak boleh ada pemasangan pipa. Pemasangan pipa itu tidak menyelesaikan masalah pencemaran limbah di lokasi itu. Kepala BLH Kota Malang Nuzul Nurcahyo mengatakan, penyetopan pemasangan pipa sudah menjadi kesepakatan bersama dan meminta semua pihak menghargai kesepakatan tersebut. "Kalau ada pihak yang melanggar pastinya akan ada sanksi. Sebelumnya, pabrik kulit PT Usaha Loka masih melanjutkan pemasangan pipa di Kali Badek meski BLH Kota Malang meminta agar proses pemasangan pipa dihentikan sebab tidak menyelesaikan pencemaran limbah pabrik di sungai tersebut.⁶⁵

Dari penjabaran sub bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pihak pabrik kulit PT. Usaha Loka telah melanggar ketentuan yang dimuat dalam UUPLH terkait pembuangan limbah cair di sungai. Limbah cair yang dibuang ke sungai belum memenuhi standar baku yang ditentukan oleh pemerintah sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Jika dibiarkan dapat merusak ekosistem sungai dan sumber air yang ada disekitar karena air bersifat menyerap kedalam

⁶⁴ Aflahul Abidin , Inilah Daerah Yang Jadi Sasaran Utama Pembangunan Pemkot Malang , <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/01/29/2016-inilah-daerah-yang-jadi-sasaran-utama-pembangunan-pemkot-malang.>, Diakses tanggal 21 April 20.39 WIB.

⁶⁵ Samsul Hadi, Camat Minta PT Usaha Loka Disanksi, <http://surabaya.tribunnews.com/2014/02/27/camat-minta-pt-usaha-loka-disanksi>, Diakses tanggal 21 April 2018 pukul 20.51 WIB.

tanah. Sehingga berpengaruh juga kepada kehidupan dan kesehatan masyarakat kelurahan Ciptomulyo. Dan warga tidak berani melakukan gugatan karena pasrah dan belum tahu alur untuk mengajukan gugatan seperti apa dan jalur tempuh hukum seperti apa saja. Sedangkan pemerintah wajib melindungi masyarakat dalam hal ini diwakilkan kepada pemerintahan desa atau SKPD Kelurahan Ciptomulyo. Pada UUPLH mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintah dalam hal penanganan lingkungan hidup yaitu berbunyi:

“ (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan nasional;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
- e. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- f. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. Mengembangkan standar kerja sama;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan lain sebagainya.”⁶⁶

Dari aturan yang dimuat pada pasal diatas, dalam kasus pencemaran limbah cair di sungai badek kelurahan Ciptomulyo, pemerintah bisa bertindak dan menangani masalah tersebut dan menggerakkan pihak-pihak yang terkait. Pihak-

⁶⁶ Pasal 63 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14.

pihak yang berhubungan dalam kasus ini antara lain BLH kota Malang, warga dan kepala lurah beserta perangkatnya Kelurahan Ciptomulyo, dan Laboratorium Jasa Tirta Malang. Pemerintah juga dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan dalam UUPH, antara lain:

- a. Teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.⁶⁷

Sanksi tersebut mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan. Warga kelurahan Ciptomulyo juga memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran sungai tersebut yang sudah diatur dalam UUPH, yaitu: ⁶⁸

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

⁶⁷ Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14.

⁶⁸ Pasal 70 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14.

Dari hak dan kewajiban yang sudah dicantumkan pada buni pasala diatas, maka warga Kelurahan Ciptomulo dalam melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur hukum atau lewat jalur mediasi.

Untuk penyelesaian sengketa terkait kasus lingkungan hidup, dalam UUPLH juga sudah mengatur secara terperinci terkait alur atau prosedur yang dimuat dalam pasal 84 – 120. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dibagi menjadi dua (2) jenis, yaitu ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan yang dimuat dalam Pasal 84 ayat (1) UUPLH.

Menurut keterangan dari Pak RW, pada tahun 2011 juga telah dilakukan upaya mediasi untuk penyelesaian masalah pencemaran limbah. Baunya tidak sedap dan diambang batas. Tahun-tahun sebelumnya juga sudah dilakukan mediasi tetapi alasan dari pihak PT Usaha Loka mengatakan bahwa hasil uji Laboratorium air sungai Badek sudah memenuhi baku mutu dan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi, sampai sekarnag pun masih menimbulkan bau yang tidak sedap. Salah satu warga juga pernah mendapatkan kompensasi pemberian air bersih tetapi dari PT Kasin. Beliau juga pernah cek uji kelayakan air sumur salah satu warga dan hasilnya tidak layak. pengecekan dilakukan di Laboratorium PDAM Kota Malang. Dan 50 KK terkena dampak dari pencemaran sungai tersebut berupa bau tidak sedap, air sumur tercemar, dan kerusakan barang elektronik. Beliau menyarankan agar pabrik PT Usaha Loka ditutup dan diberhentikan operasinya segera.⁶⁹ Dalam tujuan poin 7 MDGs yang memuat gagasan dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup terdapat target ke sepuluh (10) dimana “Menurunkan Separuh Proporsi Penduduk Tanpa Akses

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ketua RW 02 pada tanggal 25 April 2018.

terhadap Sumber Air Minum yang Aman dan Berkelanjutan serta Fasilitas Sanitasi Dasar pada 2015” ditunjukkan melalui ketentuan pencapaian penduduk atau rumah tangga yang proporsional terhadap terlindunginya akses sumber air minum.⁷⁰

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan

Penyelesaian ini dilakukan dengan cara sebelum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan secara sukarela pada para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada proses di luar pengadilan bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara lain seperti bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan, dan/atau tindakan tertentu agar tidak terulang lagi pencemaran dan/atau kerusakan.⁷¹ Dalam penyelesaiannya, bisa menggunakan jasa mediator atau arbiter jika para pihak merasa memerlukan. Masyarakat juga dapat membentuk lembaga atau badan yang menyediakan jasa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bebas dan tidak ada keberpihakan.⁷²

⁷⁰ Fahir Hassan, dan Ali Masduqi, *op.cit*, hlm 188.

⁷¹ Pasal Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁷² Pasal Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Gugatan melalui pengadilan bisa ditempuh jika upaya-upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak memberikan solusi yang tepat yang berasal dari salah satu atau para pihak yang bersengketa.⁷³ Penyelesaian tersebut dilaksanakan sukarela oleh pihak yang bersengketa. Untuk Tenggat kedaluwarsa dalam mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan tenggang waktu yang sudah diatur dalam KUHPdata dan mulai dihitung ketika diketahui terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola serta kegiatan berupa menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.⁷⁴ Pengadilan bisa menentukan pembayaran uang paksa pada setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan pengadilan. Jumlah uang paksa ditentukan sesuai dengan peraturan perUUan.⁷⁵ Instansi pemerintahan yang bertanggung jawab pada lingkungan hidup memiliki berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran.⁷⁶ Dan Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan dengan cara ada perwakilan kelompok

⁷³ Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁷⁴ Pasal Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁷⁵ Pasal Pasal 87 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁷⁶ Pasal Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

agar kepentingan diri sendiri dan/atau kepentingan masyarakat ⁷⁷ Organisasi lingkungan hidup juga berhak mengajukan gugatan dengan cara ada perwakilan kelompok agar kepentingan diri sendiri dan/atau kepentingan masyarakat yang sudah diatur oleh UUPLH. Tetapi hak untuk mengajukan gugatan hanya mencakup tuntutan agar melakukan tindakan tertentu tanpa ada tuntutan ganti rugi, kecuali dalam biaya atau pengeluaran riil dan dapat mengajukan gugatan jika sesuai dengan persyaratanantara lain “berbentuk badan hukum, menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.” ⁷⁸

Ada ketentuan tambahan didalam UUPLH yakni bahwa setiap orang bisa mengajukan gugatan terhadap keputusan TUN (Tata Usaha Negara) jika: ⁷⁹

- a. Pejabat TUN mengeluarkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal tetapi dokumen Amdal tidak lengkap;
- b. Pejabat TUN mengeluarkan izin lingkungan kepada kegiatan usaha yang tergolong wajib UKL-UPL, tetapi dokumen tidak lengkap; dan/atau
- c. Pejabat TUN yang mengeluarkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak lengkap izin lingkungannya.

Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam UUPLH juga mengatur tentang pemberian hukuman penjara dan denda jika melanggar

⁷⁷ Pasal Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁷⁸ Pasal Pasal 92 ayat (1) - (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁷⁹ Pasal Pasal 93 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

ketentuan tersebut yang termuat dalam pasal 98, 99, 101, 103, 109, 111, dan 112

ang berbunyi:

a. Pasal 98

Pada pasal 1 memuat pengaturan bahwa “seseorang dapat dipidana penjara 3 (tiga) - 10 (sepuluh) tahun dan dikenakan denda Rp3.000.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00 jika dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan terlampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dan Pasal 2 memuat aturan yaitu hingga membuat orang luka dan/atau bahaya kesehatan masyarakat dengan hukuman pidana penjara 4 (empat) - 12 (dua belas) tahun dan dikenakan denda Rp4.000.000.000,00 - Rp12.000.000.000,00.”⁸⁰

b. Pasal 99

Pada pasal 1 memuat pengaturan bahwa “seseorang dapat dijera pidana penjara 1 (satu) - 3 (tiga) tahun dan dikenakan denda Rp1.000.000.000,00 - Rp3.000.000.000,00 jika terbukti lalai yang menyebabkan melebihi baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pada pasal 2 menyebutkan juga bahwa dapat dijera pidana penjara paling singkat 2 (dua) - 6 (enam) tahun dan dikenakan denda Rp2.000.000.000,00 - Rp6.000.000.000,00. Pada pasal 3 menyebutkan bahwa jika mengakibatkan orang luka berat atau mati dijera hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) - 9 (sembilan) tahun dan dikenakan denda Rp3.000.000.000,00 - Rp9.000.000.000,00.”⁸¹

c. Pasal 100

Pada pasal 1 memuat pengaturan bahwa “seseorang dapat dijera pidana penjara jika melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan dikenakan denda maksimal Rp3.000.000.000,00. Pada pasal 2 memuat tauran lebih khusus karena hanya bisa diberlakukan jika sanksi

⁸⁰ Pasal 98 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁸¹ Pasal 99 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

administratif tidak dipatuhi atau pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali.”⁸²

d. Pasal 103

Pada pasal tersebut memuat pengaturan bahwa “ seseorang dapat dijera pidana pidana penjara 1 (satu) - 3 (tiga) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 - Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) jika terbukti telah menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 59.”⁸³

e. Pasal 109

Pada pasal tersebut memuat pengaturan bahwa “ seseorang dapat dijera pidana pidana penjara jika telah melakukan usaha dan/atau kegiatan tetapi tidak memiliki izin lingkungan yang sudah diatur pada Pasal 36 ayat (1), diberlakukan pidana penjara 1 (satu) - 3 (tiga) tahun dan dikenakan denda Rp1.000.000.000,00 - Rp3.000.000.000,00.”⁸⁴

f. Pasal 111

Pada pasal 1 memuat pengaturan bahwa “ seseorang dapat dijera pidana pidana penjara jika Pejabat pemberi izin lingkungan yang mengeluarkan izin lingkungan tidak lengkap dengan Amdal atau UKL-UPL yang sudah diatur pada Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi pidana penjara 3 (tiga) tahun dan dikenakan denda maksimal Rp3.000.000.000,00. Pada Pasal 2 memuat aturan bahwa jika pejabat pemberi izin usaha melanggar ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) dijatuhi pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan dikenakan denda maksimal Rp3.000.000.000,00.”⁸⁵

⁸² Pasal 100 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁸³ Pasal 103 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁸⁴ Pasal 109 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁸⁵ Pasal 111 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

g Pasal 112

Pada pasal tersebut memuat pengaturan bahwa “ seseorang dapat dijerat pidana pidana penjara jika pejabat berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perUUan dan izin lingkungan yang usdah diatur pada Pasal 71 dan Pasal 72, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan sehingga hilangnya nyawa manusia, dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun atau dikenakan denda maksimal Rp500.000.000,00.”⁸⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam UUPLH sudah memuat aturan secara terperinci terkait bagaimana upaya-upaya penyelesaian sengketa yang efektif. Upaya penyelesaian tersebut telah dilakukan oleh warga kelurahan Ciptomulyo sejak sebelum tahun 2011 melalui cara-cara mediasi dan negosiasi. Mediasi dan negosiasi selalu gagal dan hasilnya masih tetap sama yaitu sungai masih menimbulkan bau tidak sedap dan merusak barang elektronik. Pemerintah juga sudah turun tangan dan melakukan uji laboratorium air sungai Badek pada tahun 2014 dan hasilnya memang tercemar. Tetapi tidak ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus tersebut. masyarakat menjadi putus asa dan membiarkan tercemarnya sungai Badek tersebut karena sudah bertahun-tahun seperti itu.⁸⁷

Warga kelurahan Ciptomulo sebetulnya bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan jika cara-cara perdamaian tidak bisa berjalan. Tetapi cara penyelesaian melalui pengadilan tidak dilakukan oleh warga. Dan Pemerintah bisa memfasilitasi untuk penyelesaian sengketa tersebut. Pemerintah juga bisa langsung menjatuhkan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi

⁸⁶ Pasal 112 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan warga Kelurahan Ciptomulyo tanggal 20 April 2018.

pidana jika bukti sudah cukup kuat terkait pencemaran limbah oleh pabrik kulit PT Usaha Loka. Tetapi sanksi tidak diberikan kepada perusahaan tersebut dan seperti ada pembiaran.⁸⁸

Untuk penyelesaian masalah tersebut, menurut peneliti sebaiknya dilakukan mediasi lagi dengan mengundang para pihak antara lain pemerintah kota malang yang bisa diwakilkan kepada Lurah Ciptomulyo dan perangkat kerjanya, warga Kelurahan Ciptomulo, BLH Kota Malang dan perwakilan Laboratorium Uji air limbah Jasa Tirta Kota Malang. Dengan bertemunya para pihak tersebut membuat perjanjian yang ditanda tangani oleh para pihak dan saksi dari masing-masing perwakilan tersebut. sehingga upaya tersebut lebih efektif dan memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak. Apabila ada pelanggaran baru dilakukan upaya jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan. Kedua cara tersebut harus ada yang mengawasi dan melaporkan hasil pengawasan tersebut sehingga terbuka dan diketahui oleh para pihak.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Antara Pabrik Kulit PT. USAHA LOKA Dengan Masyarakat Ciptomulyo

Kegiatan pembangunan daerah memiliki risiko terjaidnya pencemaran lingkungan yang menyebabkan daya tampung, daya dukung, dan produktivitas lingkungan hidup menjadi menurun. Sehingga lingkungan hidup Indonesia wajib dikelola dan dilindungi dengan baik sesuai dengan asas tanggung jawab negara

⁸⁸ Hasil wawancara dengan warga Kelurahan Ciptomulyo tanggal 20 April 2018.

dan asas keadilan. Dan juga dapat memberikan kemanfaatan sosial, budaya, dan ekonomi, berdasar pada prinsip desentralisasi, kehati-hatian, dan pengakuan terhadap kearifan lokal dan lingkungan. Sehingga dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup perlu dikembangkan sistem secara terpadu dalam wujud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan sesuai asas dan konsekuen dari daerah hingga ke pusat.

Salah satu upaya pengendalian dampak secara dini yaitu dengan cara sistem Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yaitu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang diperkuat secara terus menerus dengan peningkatkan akuntabilitas dalam penyusunan amdal dengan mensyaratkan adanya lisensi bagi penilai amdal dan untuk para penyusun dokumen amdal harus memiliki sertifikasi keahlian, serta menjelaskan sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal dipakai sebagai syarat yang utama agar bisa mendapatkan izin lingkungan (harus dimiliki) sebelum memperoleh izin usaha.

Upaya preventif untuk pengendalian dampak lingkungan hidup yaitu dengan cara memaksimalkan atribut pengawasan dan perizinan. Dan jika sudah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, ada upaya represif yang konsekuen, efektif, dan konsisten. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup menurut Hukum Perdata ada dua, yakni di luar pengadilan dan di dalam pengadilan (berasal dari gugatan dari perwakilan kelompok, organisasi lingkungan, atau pemerintah). Dengan kedua mekanisme tersebut harapannya menimbulkan efek jera dan meningkatkan kesadaran seluruh pihak yang memiliki kepentingan.

Penegakan hukum pidana dalam UUPH mencakup perluasan alat bukti, hukuman minimum di samping maksimum, ppidanaan bagi pelanggaran baku mutu, dan pengaturan tindak pidana korporasi dengan menjaga asas ultimum remedium yang penerapan penegakan hukum pidana menjadi upaya terakhir jika penerapan penegakan hukum administrasi tidak berhasil juga. Penerapan asas tersebut hanya meliputi tindak pidana formil tertentu mencakup ppidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa “Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*)”.⁸⁹ Ketiga unsur tersebut saling bersinergi dan membentuk satu kesatuan tujuan yang hakiki. Penegakan hukum yaitu sebuah usaha agar terciptanya ide dan konsep hukum yang sesuai dengan harapan rakyat. Tujuan hukum mengandung nilai-nilai moral yaitu berwujud keadilan dan kebenaran yang diwujudkan dalam realitas nyata.⁹⁰ Tujuan pokok hukum antara lain tercipta masyarakat yang tertib dan seimbang, sehingga harapannya kepentingan-kepentingan tersebut menjadi terlindungi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, hukum sebagai pembagi wewenang, hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, serta menjaga kepastian hukum.⁹¹ Agar terciptanya kedamaian dalam masyarakat, maka penegakan hukum

⁸⁹ Sudikmo Mertokusumo. 2001. **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**. Bandung . Citra Aditya Bakti. hlm. 1.

⁹⁰ Sajipto Rahardjo. 2009, **Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis**, ctk. Kedua. Yogyakarta. Genta Publishing. hlm.vii.

⁹¹ Sudikno Mertokusumo. 1999. **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**. Yogyakarta. Liberty. hlm. 71.

harus berasal dari masyarakat itu sendiri.⁹² Berdasarkan teori Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hokum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.⁹³ Dalam penegakan hukum, hukum atau peraturan perUUan yang berlaku dapat berfungsi sesuai dengan kehendak dan dijalankan oleh masyarakat. Kepatuhan hukum ditentukan berdasarkan tingkat kesadaran hukumnya. Sedangkan kesadaran hukum memiliki indikiator sebagai berikut :⁹⁴

- a. Pengetahuan tentang peraturan (law awareness);
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan (law acquaintance);
- c. Sikap hukum (legal attitude); dan
- d. Perikelakuan hukum (legal behavior).

Dari teori yang dijelaskan diatas, menurut analisis penulis teori yang sesuai dengan penelitian yang diangkat adalah teori dari Soerjono Soekanto bahwa efektivitasnya penegakan hukum terkait kasus pencemaran limbah di sungai kelurahan Ciptomulo dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Faktor Hukum

Dari segi pengaturan hukum tentang pengelolaan limbah industri atau pabrik di dalam UUPLH di Indonesia sudah sistematis dan terperinci, baik mulai dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah. Hal ini dapat juga kita lihat dari pengaturan hak, larangan, kewajiban maupun sanksi. Hal ini dapat kita lihat dalam penjabaran sebagai berikut :

- Pasal 65 ayat 1 : “....setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.⁹⁵

⁹² Maria Farida. 1998. **Ilmu Perundang – Undangan**. Yogyakarta. Kanisius. hlm. 112.

⁹³ Lawrence Meir Friedman. 2001. **Hukum Amerika: Suatu Pengantar**, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Jakarta. PT. Tata Nusa. hlm .8.

⁹⁴ Soerjono Soekanto & Mustofa Abdullah. 1980. **Sosiologi Hukum dan Masyarakat**. Jakarta. Rajawali. hlm. 96.

⁹⁵ Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

- Pasal 67 ayat 1 : “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.”⁹⁶
- Pasal 69 : “...setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, termasuk B3 yang dilarang menurut peraturan undang undang.”⁹⁷
- Pasal 74 ayat 1 : melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen yang di perlukan, memotret, membuat rekaman, mengambil sampel, memeriksa instalasi, menghentikan pelanggaran.⁹⁸
- Pasal 76 : daya paksaan pemerintah, teguran berbentuk tertulis, hingga pencabutan izin lingkungan..⁹⁹

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan harusnya ada sistem pengawasan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sehingga para pihak saling diuntungkan dan proses penanganan pencemaran limbah tersebut segera teratasi dengan baik. Dan pihak polisi belum melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Padahal peran polisi sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketenangan warga, selain itu juga sudah dilakukan mediasi dengan pihak pemerintah, namun sering kali gagal dan tidak ada penyelesaiannya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Dalam kasus pencemaran limbah pabrik kulit, sarana yang dilakukan oleh pabrik hanya pengurangan bau limbah dengan mencampur zat kimia, kemudian tidak ada alat pendukung untuk memantau limbah pencemaran serta gedung pengawasan yang bisa dilakukan oleh warga secara langsung agar pengawasan tersebut bisa secara terbuka.

⁹⁶ Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁹⁷ Pasal 69 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁹⁸ Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁹⁹ Pasal 76 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam kasus pencemaran limbah pabrik, sudah melakukan upaya diluar pengadilan, yaitu dengan cara mediasi yang meliputi berbagai pihak, yaitu pemerintah, BLH, warga dan organisasi yang berhubungan dengan lingkungan, namun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, sehingga masyarakat putus asa dan menerima apa adanya, padahal putus asa itu tidak baik, seharusnya kita tetap berusaha untuk melakukan negosiasi dan mediasi sampai ketemu hasilnya.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan masyarakat yang ada di wilayah kelurahan ciptomulyo kecamatan sukun bahwa mereka sangat putus asa, sebab warga sudah melakukan mediasi berulang ulang melalui pemerintah namun hasilnya tetap nihil. Dan adanya budaya permisif yaitu dimana masyarakat mau menerima apa adanya terhadap suatu permasalahan dalam hal ini menerima dengan ikhlas bau yang tidak sedap karena pencemaran limbah pabrik kulit tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Model penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara pabrik kulit PT Usaha Loka dengan masyarakat Ciptomulyo dilakukan dengan cara non litigasi (diluar pengadilan) yaitu dengan cara negosiasi dan mediasi yang mana meliputi pihak pemerintah, warga ciptomulyo dan pihak pabrik kulit PT usaha loka. Namun dalam pelaksanaannya selalu gagal dan tidak efektif, Sehingga Masih ada keluhan warga terkait bau tidak sedap dan barang elektronik rusak, selain itu warga juga belum melakukan upaya pengajuan gugatan litigasi (pengadilan) terkait kasus tersebut.
2. Faktor - faktor yang menghambat penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara Pabrik kulit PT. Usaha Loka dengan masyarakat antara lain:

- a. Faktor Hukum

Dari segi hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara pabrik kulit PT Usaha loka dengan masyarakat ciptomulyo hanya dilakukan dengan cara non litigasi (diluar pengadilan) yang mana terdapat pihak pemerintah, masyarakat ciptomulyo dan pihak pabrik kulit PT Usaha Loka, namun dalam mediasi tersebut ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan dan tidak berhasil

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan hukum tidak ada pengawasan dari pihak polisi dan pemerintah, serta penjatuhan sanksi jika melanggar. Harusnya ada sistem pengawasan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sehingga para pihak saling diuntungkan dan proses penanganan pencemaran limbah tersebut segera teratasi dengan baik. Selain itu peran polisi sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketenangan warga.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Dalam kasus pencemaran limbah tersebut, masih banyak sarana dan prasarana yang tidak memadai, seperti tidak ada fasilitas pengujian yang bisa dilakukan oleh warga, namun pabrik kulit usaha loka hanya memasang pipa yang di cor di sungai untuk jalannya limbah, tetapi masih menimbulkan bau tidak sedap dan tercemarnya air sumur warga.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam menanggapi kasus terkait bau limbah pabrik kulit belum semuanya aktif, karena banyak sebagian dari mereka tidak mau memperjuangkan ataupun melaporkan, hanya sebagian warga saja yang peduli dengan bau limbah,

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan masyarakat yang mana warga tidak mau lagi mengurus kasus bau limbah pabrik dan melakukan pembiaran yang semakin lama sehingga bau tersebut sudah dianggap biasa, selain itu mereka pasrah karena warga sudah melakukan mediasi berkali kali namun hasilnya gagal, maka dari itu tumbuh budaya permisif dan putus asa.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran antara lain :

- a. Bagi Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi dan pertemuan rutin untuk pengawasan pengolahan dan pembuangan limbah khususnya pabrik PT Usaha Loka lewat lembaga yang berkompeten dalam bidangnya sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus yang serupa.
- b. Bagi Masyarakat hendaknya di tumbuhkan budaya hukum, sehingga masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pencemaran lingkungan, agar masyarakat terhindar dari bau yang tidak sedap terkait limbah pabrik tersebut. Serta ikut membantu dalam pengawasan terhadap pembuangan sisa limbah cair yang sudah dinetralkan di lingkungan sekitarnya dan berperan aktif apabila terjadi ketidaksesuaian.
- c. Bagi PT Usaha Loka hendaknya lebih melakukan pengawasan secara ketat dan berkala dalam melakukan pengolahan dan pembuangan limbah cair sehingga tidak membuat sungai Ciptomulyo tercemar lagi. kemudian jumlah pekerja yang bekerja di PT Usaha Loka diharapkan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari warga Kelurahan Ciptomulyo serta memberikan dana dan bantuan CSR lebih banyak kepada warga kelurahan ciptomulyo kecamatan sukun

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah. 1995. **Penegakan Hukum Lingkungan**. Jakarta, Arkha Media Cipta.
- Barda Nawawi Arief. 2002. **Kebijakan Hukum Pidana**. Bandung . Citra Aditya Bakti.
- Dellyana,Shant. 1988. **Konsep Penegakan Hukum**. Yogyakarta. Liberty.
- Eggi Sudjana, Riyanto. 1999. **Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia**. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Esmi Warrasih Puji Rahayu. 2005. **Pranta Hukum Sebuah Telaah Sosiologis**. Semarang . Suryandaru Utama.
- Hans Kelsen. 2011. **Teori Umum Tentang Hukum dan Negara**. terj. Muttaqien, Raisul. Bandung . Nusa Media.
- Ilhami Bisri. 2012. **Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia**. Jakarta. Rajawali Pers.
- Heinhard Steiger, et al. 1980. **The Fundamental Right To a Decent Environment, dalam Trends In Environemntal Policy On Law**. IUCN. Gland, Swizerland. Dalam Koesnadi Hardjasoemantri. 1993. **Hukum Tata Lingkungan**. Edisi Ke 5. Gadjah Mada University Press.
- Maria Farida. 1998. **Ilmu Perundang – Undangan**. Yogyakarta. Kanisius.
- Lawrence Meir Friedman. 2001. **Hukum Amerika: Suatu Pengantar**, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Jakarta. PT. Tata Nusa.
- Sabian Utsman. 2008. **Menuju Penegakan Hukum Rseponsif**. ctk. Pertama. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Satjipto Raharjo. 2009. **Penegakan Hukum**. Yogyakarta . Genta Publishing.
- Siri Sundari Rangkuti. 1996. **Hukum Lingkungan dan Kebijakanaksanaan Lingkungan Nasional**. Surabaya. Airlangga University Press.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**. Yogyakarta. Liberty.
- Sudikmo Mertokusumo. 2001. **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**. Bandung . Citra Aditya Bakti.
- Supriadi. 2008. **Hukum Lingkungan Indonesia**. Jakarta. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto & Mustofa Abdullah. 1980. **Sosiologi Hukum dan Masyarakat**. Jakarta. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta . UI-Press.
- Soerjono Soekanto. 2004. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum**. Cetakan Kelima. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosoebroto. **Pengelolaan dan Analisa Data**. Dalam Koentjaraningrat. 1977. **Metode Penelitian Masyarakat**. Cetakan Kedua. Jakarta. P.T. Gramedia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

ARTIKEL, JURNAL, DAN INTERNET

- Dhayal Gustopo Setiadjit , Faidliyah Nilna Minah, dan Taufik Hidayat. 2015. **IbM Kelurahan Ciptomulyo Kota Malang Dalam Mengolah Daun Tanaman Aloe Vera Sebagai Bahan Utama Komoditas Produk Makanan**. Volume 05, Nomor 02. *INDUSTRI INOVATIF*.
- Fahir Hassan, dan Ali Masduqi. 2014. **Pemodelan Penurunan Sisa Chlor Jaringan Distribusi Air Minum Dengan EPANET (Studi kasus Kecamatan Sukun Kota Malang)**, Volume 03 Nomor 02. *JURNAL TEKNIK POMITS*.
- Valens Ngali Prasetya, Liliya Dewi Susanawati. **Penentuan Daya Tampung Sungai Badek Terhadap Beban Pencemar Akibat Limbah Cair Penyamakan Kulit di Kelurahan Ciptomulyo, Malang**. Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan . Universitas Brawijaya. Majalah Bulanan Lingkungan Hidup OZON, Volume 02, Nomor 7. April 2001. Yayasan Cahaya Reformasi Semesta.
- Suwiryo Ismail. **Prospek Penegakan Hukum Lingkungan di Indoensia, Majalah Advokasi Lingkungan Tanah Air**. Nomor 08 Th. XX/2000. Walhi. hlm 27, dalam Muhamad Erwin. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung . Refika Aditama.
- Aflahul Abidin , Inilah Daerah Yang Jadi Sasaran Utama Pembangunan Pemkot Malang , <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/01/29/2016-inilah-daerah-yang-jadi-sasaran-utama-pembangunan-pemkot-malang>., Diakses tanggal 21 April 2018.
- Tempo.co, Air Sumur Warga Malang Tercemar Limbah, Jumat, 24 Januari 2014 14:32 WIB, online, dapat diakses di <https://nasional.tempo.co/read/548031/air-sumur-warga-malang-tercemar-limbah>, diakses pada tanggal 9 Januari 2018.

- Tempo.co Dua Pabrik Kulit di Malang Mencemari Lingkungan, Senin, 24 Februari 2014 17:47 WIB, online, dapat diakses di <https://nasional.tempo.co/read/557131/dua-pabrik-kulit-di-malang-mencemari-lingkungan>, diakses pada 9 Januari 2018.
- <http://ngalam.co/2016/06/01/profil-kelurahan-ciptomulyo-kecamatan-sukun-kota-malang/>, diakses tanggal 20 April 2018.
- <https://kelciptomulyo.malangkota.go.id/2016/03/22/ciptomulyo-menuju-otonomi-award-2016/>, diakses tanggal 20 April 2018.
- <https://jatim.antaranews.com/berita/125370/warga-malang-keluhkan-limbah-pabrik-kulit>, Diakses tanggal 21 April 2018.
- Redaksi*. Pemkot Ancam Larang Buang Limbah di Kota Malang. Radar Malang. Jawa Pos Group. 29 Agustus 2014.
- Pemerintah Kota Malang, Profil kesehatan kota Malang Tahun 2014, hlm 10, http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2014/3573_Jatim_Kota_Malang_2014.pdf, Diakses tanggal 22 April 2018.
- Samsul Hadi, Camat Minta PT Usaha Loka Disanksi, <http://surabaya.tribunnews.com/2014/02/27/camat-minta-pt-usaha-loka-disanksi>, Diakses tanggal 21 April 2018.

